



# Laporan Kinerja KPPU

---

Tahun Anggaran 2023

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA





**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2024

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Muhammad Faisal

## KATA PENGANTAR



Tahun 2023 adalah tahun yang dipenuhi dengan berbagai transisi untuk penguatan kelembagaan dan pencapaian target kinerja KPPU. Pertama, adalah pergantian Komisioner periode 2018 – 2023 yang seharusnya berakhir pada bulan April 2023, tetapi kemudian Anggota Komisioner yang terpilih untuk periode selanjutnya baru ditetapkan pada bulan November 2023. Selain itu, terdapat juga transisi dalam penegakan hukum dengan perubahan atas peraturan penanganan perkara, penilaian merger dan akuisisi, maupun pengawasan kemitraan. Intinya perubahan peraturan ini dibuat untuk lebih


memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, memperluas pengawasan dan penyederhanaan proses, serta untuk mendukung prioritas pada upaya mencapai target RPJMN 2020 – 2024.

Pada tahun ini juga, KPPU menerima Surat Presiden Nomor B-555/M/D-1/HK.03.00/06/2023 tentang Persetujuan Prakarsa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menginisiasi terbitnya Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang sampai dengan akhir tahun 2023 telah sampai pada tahap harmonisasi. Hal tersebut menjadikan dasar untuk TA 2023 agar lebih siap menghadapi transisi dalam implementasi Perpres tersebut.

Kinerja KPPU yang disampaikan dalam Laporan ini merefleksikan upaya KPPU dalam mengoptimalkan seluruh Sumber Daya pada tahun 2023 dan mencapai target output yang telah disepakati untuk pemenuhan kontribusi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Indikator kinerja kami dapat dicermati pada Angka Indeks Persaingan Usaha yang juga menjadi salah satu indikator RPJMN adalah 4,91 indeks poin dari skala 1-7. Indeks Persaingan Usaha secara komprehensif merupakan gambaran persaingan usaha sektoral, daerah dan nasional secara keseluruhan. Pada target RPJMN, di tahun 2024 angka tersebut harus mencapai 5 indeks poin.

Perbaikan dan koreksi yang kami evaluasi pada Tahun 2023 akan menjadi dasar capaian kinerja KPPU pada Tahun 2024. Prioritas utama adalah fokus terhadap iklim usaha yang sehat dan pelayanan KPPU terhadap masyarakat terus membaik, karena keduanya adalah sinergi yang tepat untuk menegaskan bahwa Persaingan Usaha yang sehat tentunya dapat tercipta dengan dukungan pelaku usaha dan masyarakat umum. Pada tahun 2023, peran KPPU sebagai pengawas telah mendapat dukungan dari berbagai Kementerian maupun Lembaga, sehingga pada Tahun 2024 akan banyak dioptimalkan kolaborasi yang lebih efektif antar Lembaga. Dari sisi kebijakan, KPPU lebih banyak memberikan rekomendasi kebijakan persaingan kepada





Pemerintah. Aspek penting lain yang mencirikan adanya upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat adalah perubahan yang berkesinambungan di berbagai pemangku kepentingan. Perubahan tersebut menjadi materi pengawasan kami untuk dapat menyempurnakan pencapaian - pencapaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya.

Sinergi kebijakan sektoral dan dukungan kelembagaan sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kami juga melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah strategis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU pada tahun - tahun berikutnya. Selama masa pandemi, KPPU turut mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui relaksasi penegakkan hukum persaingan usaha. Akhirnya, saya berharap agar pada tahun mendatang kita senantiasa mendapat lindungan-Nya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memperkuat posisi KPPU dalam pengawasan persainga usaha.

Salam Persaingan Sehat! Kerja Bersama untuk Indonesia Maju !

Jakarta, 28 Februari 2024  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dr. Ir. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja KPPU TA 2023 adalah pemenuhan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Instansi dalam mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja KPPU TA 2023, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat dapat mencermati berbagai informasi utama tentang tugas, fungsi dan peran KPPU dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Informasi yang dicantumkan dalam Laporan ini akan di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja yang disepakati telah dipenuhi sesuai target. Pemenuhan capaian tersebut mencerminkan bahwa komitmen KPPU terjaga di tengah perbaikan ekonomi nasional pasca pandemic Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU telah mencermati kondisi yang dihadapi pada tahun 2023 dan mengimplementasikannya dengan baik dalam pemanfaatan anggaran dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh KPPU.

Berikut adalah penjelasan umum dari target dan akuntabilitas kinerja KPPU:

1. Hasil pengukuran kinerja tingkat Lembaga yaitu kinerja KPPU TA 2023 pada 3 (tiga) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai target (100%);
2. Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 pada Indeks Persepsi Persaingan Usaha melebihi target TA 2023 yaitu realisasi 4.91 dengan target 4.9 atau realisasi capaian sebesar 100%;
3. Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 pada Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku sebesar 100% yang terealisasi 100% dari target 100%;
4. Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 pada Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100) tercapai sebesar 100% yang terealisasi 80.23 dari target 80;

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada TA 2023 memperoleh anggaran total sebesar Rp 122.534.805.000,-, dengan alokasi anggaran untuk Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp 28.324.790.000,- (55.90%) dari total anggaran KPPU non-operasional sebesar Rp 50.661.962.000,- dan untuk melaksanakan SS-1 dikelompokkan kedalam anggaran *Core*. Sedangkan alokasi anggaran untuk Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp 22.337.172.000,- (44.09%) dari total anggaran KPPU non-operasional Rp 50.661.962.000,- dan untuk melaksanakan SS-2 dikelompokkan ke dalam anggaran *supporting*;
6. Realisasi anggaran KPPU yang terdiri 2 (dua) Program TA 2023 sebesar Rp 120.681.840.512,- atau mencapai 98.49% dari total pagu sebesar Rp 122.534.805.000,-;
7. Faktor pendukung yang berperan dalam capaian kinerja KPPU dalam TA 2023 adalah:
  - a. Sinergi antara KPPU dan Pemerintah yang semakin tertata dan saling mendukung dalam berbagai kebijakan yang pro persaingan usaha.
  - b. Dukungan dari Kementerian Keuangan terhadap pemanfaatan anggaran yang bersumber dari PNPB dan relaksasi anggaran yang semula digunakan untuk *automatic adjustment*.
  - c. Digitalisasi layanan untuk mendukung capaian target dengan melihat kesesuaian antara upaya pencapaian target dan perubahan format kegiatan menjadi digital.
  - d. Sinkronisasi peraturan internal KPPU dengan Peraturan Presiden terkait Kelembagaan KPPU.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPPU pada periode 2020 – 2024. Pada tahun ini, juga terdapat keterlibatan KPPU dalam pelaksanaan *major project* dalam RPJMN yang dioptimalkan KPPU di 7 Kantor Wilayah (Kanwil) yang berdomisili di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Yogyakarta.

Kontribusi KPPU terhadap target RPJMN tersebut membutuhkan optimalisasi anggaran dan tetap menjaga pemenuhan target kinerja yang telah disepakati dalam Renstra KPPU 2020-2024, maka langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya pada tahun 2024 adalah:

1. Sinkronisasi peraturan internal KPPU dengan Peraturan Presiden terkait Kelembagaan KPPU.
2. Digitalisasi Layanan untuk percepatan tindak lanjut laporan dari masyarakat.
3. Penyiapan dokumen usulan kerangka regulasi terkait amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Rancangan RPJMN 2025-2029.
4. Penyusunan kembali visi misi Komisioner periode 2024-2029.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
LAMPIRAN .....	viii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. TUGAS DAN FUNGSI .....	2
B. ORGANISASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) .....	4
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	6
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	15
C. TARGET KINERJA TAHUN 2023.....	16
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	18
BAB III.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA TA 2023 .....	23
B. ANALISIS EFISIENSI.....	40
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	45
D. HAMBATAN DAN KENDALA .....	46
BAB IV .....	49
PENUTUP .....	49
A. KESIMPULAN KINERJA TAHUNAN.....	49
B. RENCANA TINDAK TAHUN BERIKUTNYA.....	50



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi KPPU .....	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai KPPU TA 2023.....	5
Tabel 1.3	Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra KPPU 2020-2024 .....	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	16
Tabel 2.2	Rincian Alokasi Anggaran KPPU TA 2023 .....	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	18
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama KPPU pada Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	18
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Unit Kerja Eselon I dan Operasional KPPU TA 2023 .....	20
Tabel 3.1	Ringkasan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023.....	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2023 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha).....	26
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2023 (Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sesuai dengan Peraturan Berlaku).....	32
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2023 (Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> ).....	34
Tabel 3.5	Rekapitulasi Nilai Indeks terkait layanan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Sekretariat Jenderal TA 2023 .....	36
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Periode 2020-2024 .....	42
Tabel 3.7	Perbandingan Skor Indeks Persaingan Usaha Periode 2019-2023.	42
Tabel 3.8	Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis TA 2023 .....	46


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPPU .....	5
Gambar 2.1 Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 .....	10
Gambar 2.2 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024 .....	11
Gambar 2.3 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam .....	12
Gambar 2.4 Alokasi Anggaran KPPU TA 2023 .....	14
Gambar 2.5 Rincian Anggaran Program Prioritas Nasional TA 2023 .....	14
Gambar 2.6 Persentase Alokasi Anggaran per Unit Eselon I dan Operasional KPPU TA 2023 .....	20
Gambar 3.1 Peta Persaingan Usaha di Provinsi .....	28
Gambar 3.2 Grafik Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot Sama Tingkat Provinsi di Indonesia TA 2023 .....	30
Gambar 3.3 Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha.....	30
Gambar 3.4 Grafik Hasil Penilaian Indeks SPBE Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023.....	39
Gambar 3.5 Grafik Analisis Efisiensi SS-1 dan SS-2 .....	41
Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran KPPU .....	45

## LAMPIRAN

- Lampiran I : 1. Perjanjian Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023  
2. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep.1/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024
- Lampiran II : 1. Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPU TA 2023 (Sasaran Strategis)  
2. Penjelasan Indeks Persaingan Usaha TA 2023  
3. Rekapitulasi Putusan KPPU yang dibatalkan di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga TA 2023  
4. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2023 pada Program Pengawasan Persaingan Usaha Pendukung Prioritas Nasional  
5. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2023 pada Program Dukungan Manajemen  
6. Rekapitulasi Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2022 dan 2023  
7. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBK KPPU TA 2022 dan 2023  
8. Pagu dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2023 (menurut Sasaran Strategis)  
9. Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Periode 2020-2024
- Lampiran III : 1. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Kedeputian Bidang Penegakan Hukum dan Kedeputian Kajian dan Advokasi TA 2023  
2. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Sekretariat Jenderal TA 2023  
3. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputian Penegakan Hukum TA 2023  
4. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputian Kajian dan Advokasi TA 2023



- 
5. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Sekretariat Jenderal TA 2023
  6. Penjelasan kebutuhan, kondisi kompetensi dan jumlah pegawai KPPU menurut *Road Map* SDM 2020 – 2024
  7. Persentase Penyebaran SDM berdasarkan data *Eksisting* Pegawai KPPU (per 31 Desember 2023)
  8. Persentase Perbandingan Alokasi Anggaran di *Core* dan *Supporting* TA 2023
  9. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2023 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk pencapaian Prioritas Nasional (PN-1)
  10. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2023 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional

# Pendahuluan





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Persaingan usaha yang sehat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan merupakan perwujudan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga tercipta kompetisi yang sehat dan adil. Dalam perannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga Negara yang dibiayai APBN juga diwajibkan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, hal itu sesuai dengan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah berupa Laporan Kinerja.

Pelaporan dalam bentuk Laporan Kinerja TA 2023 juga telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan agar juga diimplementasikan disetiap unit kerja.

Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat atas penggunaan anggaran negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sumber-sumber anggaran lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan selama masa satu Tahun Anggaran 2023.

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas dan fungsi KPPU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan



atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada periode RPJMN 2020-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kabinet Kerja telah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dan “ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” menjadi prioritas pertama dengan arah kebijakannya yang tertuang pada Program Prioritas (PP) Nomor 5 (lima) dan 6 (enam) sebagai berikut:

- a. Program Prioritas Nomor 5 (lima) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
  - Kegiatan prioritas: peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar
- b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
  - Kegiatan Prioritas: perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan

Penjelasan rinci tentang tugas dan fungsi KPPU dijelaskan dalam Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi KPPU

Tugas	Fungsi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;</li> <li>2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;</li> <li>3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;</li> <li>4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;</li> <li>5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;</li> <li>2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;</li> <li>3. Pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan</li> <li>4. Pelaksanaan administratif.</li> </ol>

Tugas	Fungsi
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha; 7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.	

Sumber: UU No. 5 Tahun 1999

## **B. ORGANISASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

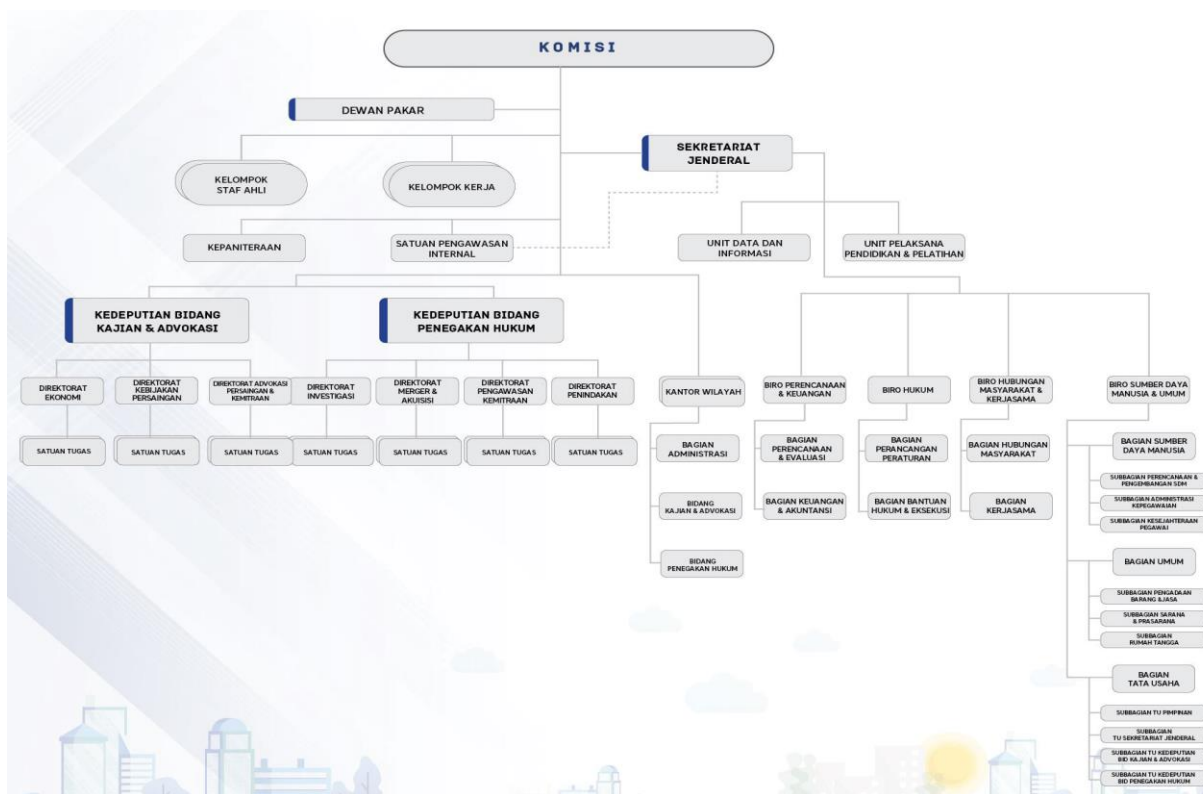
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, organisasi KPPU terdiri dari Ketua Komisi, Anggota Komisi yang dibantu Sekretariat. Sekretariat itu sendiri terdiri:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi;
3. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.

Ketua dan Anggota Komisi juga dibantu oleh 1 (satu) unsur pengawas dan 4 (empat) unsur pendukung yakni:

1. Satuan Pengawasan Internal;
2. Kepaniteraan;
3. Kelompok Kerja;
4. Kelompok Staf Ahli; dan
5. Kantor Wilayah.

Selanjutnya penjabaran organisasi dan tata kerja KPPU ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPPU  
 Sumber: KPPU, 2023

KPPU sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan bagian dari 9 orang Komisioner berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 2 dalam UU No 5 tahun 1999, dicantumkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh Sekretariat. Saat ini jumlah pegawai Sekretariat KPPU sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 383 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai KPPU TA 2023

No.	Unit Eselon I	Jumlah
1.	Sekretariat Jenderal	178 Pegawai
2.	Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi	26 Pegawai
3.	Kedeputian Bidang Penegakan Hukum	72 Pegawai



No.	Unit Eselon I	Jumlah
4.	Kantor Wilayah	107 Pegawai
	<b>TOTAL</b>	<b>383 Pegawai</b>

Sumber: KPPU, 2023

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Persaingan sehat adalah pencapaian utama KPPU dalam melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 1999 sejak tahun 2000. KPPU mendukung terwujudnya bangsa yang berdaya saing dan kemandirian ekonomi secara nasional.

KPPU juga berkontribusi dalam Agenda Pembangunan Pertama sesuai dengan pelaksanaan Prioritas Nasional (PN): Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Sasaran PN tersebut adalah:

1. Sasaran pertama, Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Sasaran kedua, Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Amanat PN di atas diturunkan oleh KPPU pada Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2020-2024 yang telah diundangkan melalui Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 602 pada tanggal 11 Juni 2020. Pada Renstra 2020-2024 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan visi misi Presiden 2019-2024.

Sasaran Strategis KPPU dijelaskan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra KPPU 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SS
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
2	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i>

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SS
		(Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat sumber penerimaan dari PNPB yang dapat dimanfaatkan oleh KPPU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

#### **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi tentang tugas dan fungsi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Prioritas Nasional dan Renja tahun 2023 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Membandingkan, menganalisis dan menjabarkan kinerja KPPU tahun 2023 yang diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari seluruh Sasaran Strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Pada subbab ini juga menjelaskan rata-rata capaian kinerja dari keseluruhan Sasaran Strategis, apakah telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan/penurunan pencapaian kinerja.
4. Bab IV Penutup  
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPPU tahun 2023 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

# Perencanaan Kinerja





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan persaingan usaha yang mendukung keberhasilan Visi Misi Presiden, sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

#### **Visi:**

**“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**

KPPU merancang Rencana Strategis yang selaras dengan Visi Misi Presiden dan merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU melaksanakan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan**

Selanjutnya tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:

**“Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”**

Untuk mendukung pencapaian tujuan, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPPU sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat;
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government*

### **Prioritas Nasional**

Dalam amanat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dijelaskan keterkaitan antara Misi Presiden, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan yang menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. Dalam hal penugasan KPPU yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, maka pencapaian sasaran pembangunan, indikator yang bermuara pada pencapaian target pembangunan yang ditugaskan kepada KPPU pada RPJMN 2020-2024, KPPU harus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.



Gambar 2.1 Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024



**Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional ke-satu (PN-1)**  
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



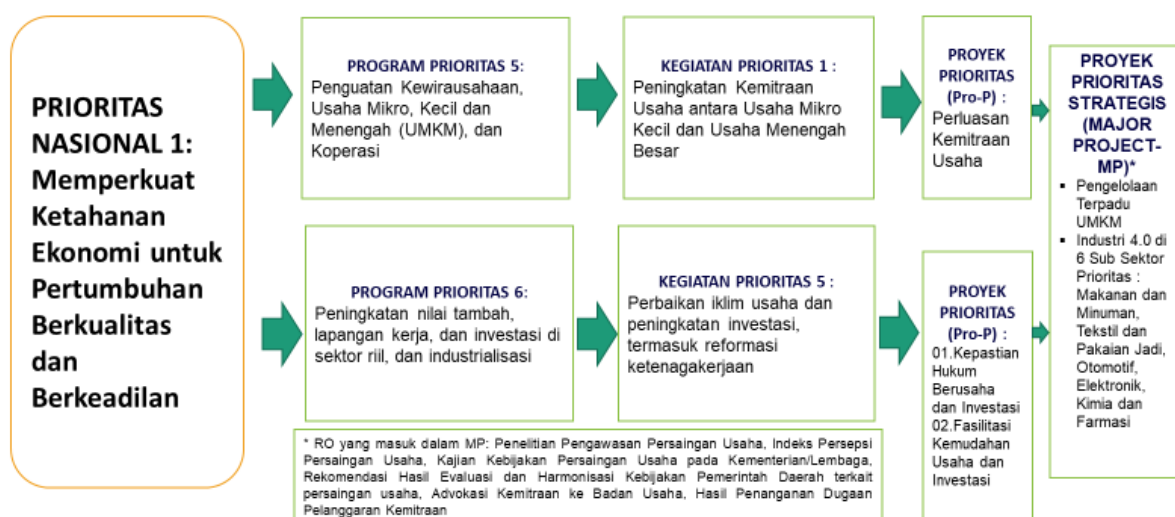
Gambar 2.2 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Dengan mengacu pada Renstra KPPU 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPPU Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602) pada tanggal 11 Juni 2020, maka indeks persaingan usaha dapat digunakan untuk mengukur kinerja KPPU dari sisi hasil (*outcome*) akhir dari berbagai proses dan output yang telah dilakukan dan digunakan KPPU untuk mendorong persaingan usaha yang sehat agar terjadi efisiensi ekonomi nasional yang menjadi tujuan pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Renstra KPPU 2020-2024.



## DUKUNGAN KPPU PADA PN, PP, KP Pro-P, MP TAHUN ANGGARAN 2023




Gambar 2.3 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023

Sumber: Bappenas, 2023

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2022, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 berkomitmen untuk memberikan pengarahannya pada kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional.

KPPU dalam RKP 2023 mendukung pencapaian Prioritas Nasional Kesatu (PN-1) yaitu **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**. Pencapaian keberhasilan target PN-1 tersebut, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut, diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-1 sendiri terbagi ke dalam 8 (delapan) PP.

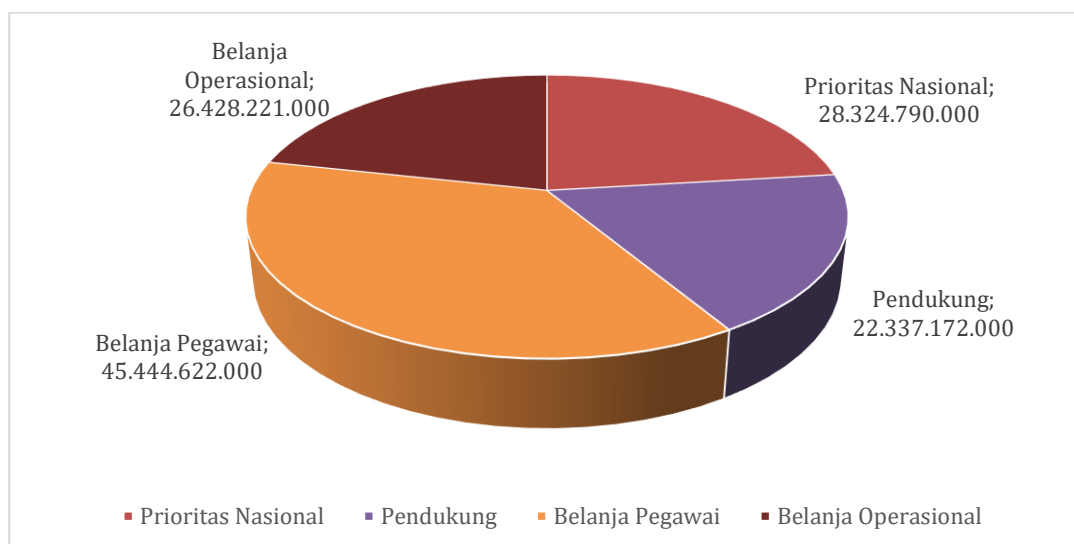


PN-1 yang dalam turunannya melalui PP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa KPPU mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2020-2024 untuk 2 (dua) PP yaitu PP 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dan PP 6: Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.

Pada TA 2023, KPPU melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen. Dukungan KPPU terhadap pencapaian PN-1 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Pengawasan Persaingan Usaha. Total alokasi anggaran KPPU pada Pagu Awal TA 2023 sebesar **Rp 113.129.034.000,-** (seratus tiga belas miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Pagu Akhir menjadi sebesar **Rp 122.534.805.000,-** (seratus dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena KPPU mendapatkan tambahan pemanfaatan PNBPN baru yaitu persetujuan penggunaan dana PNBPN pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas Jenis PNBPN Layanan Penilaian terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-858/AG/AG.3/2023 tanggal 8 Desember 2023. KPPU dapat memanfaatkan menyetujui penggunaan dana PNBPN baru tersebut paling tinggi sebesar 50,7% dari PNBPN. Serta pemanfaatan PNBPN dari denda persaingan usaha yang masih berlaku sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, KPPU dapat memanfaatkan sebesar 44% dari PNBPN yang dapat dialokasikan untuk kegiatan dalam rangka:

- 1) Penyediaan dan peningkatan layanan yang berkualitas dan terukur pada KPPU; dan/atau
- 2) Mendorong peningkatan PNBPN pada KPPU.

Alokasi Anggaran KPPU TA 2023 untuk mendukung PN-1 dijelaskan pada Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Alokasi Anggaran KPPU TA 2023

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen. Berikut rincian Pagu Akhir Anggaran KPPU TA 2023 yang masuk dalam Program Prioritas Nasional dalam Grafik sebagai berikut:



Gambar 2.5 Rincian Anggaran Program Prioritas Nasional TA 2023

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)



KPPU pada TA 2023 sudah melaksanakan 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Pengawasan Persaingan Usaha yang difokuskan pada kegiatan:
  - a. Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha
  - b. Analisa Kebijakan Pemerintah
  - c. Advokasi Persaingan Usaha dan advokasi kemitraan
  - d. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
  - e. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha
  - f. Penanganan Perkara Persaingan Usaha
  - g. Penilaian Merger dan Akuisisi
  - h. Pengawasan Kemitraan
  - i. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU
  
2. Program Dukungan Manajemen yang difokuskan pada kegiatan:
  - a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
  - c. Peningkatan Data dan Informasi
  - d. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi
  - e. Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga
  - f. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU
  - g. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum pada Program Dukungan Manajemen juga melakukan pengelolaan Belanja Operasional yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengukuran pencapaian Sasaran Strategis ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan targetnya pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang, *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (kualitas dan target berkembang dan selalu disempurnakan).

Selanjutnya pada Periode Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2020-2024 akan bergeser pada upaya pencegahan dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, dengan tetap memperhatikan penegakan hukum pada dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersusun dari Indikator Sasaran Strategis yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pelaku usaha, *stakeholder* terkait dan instansi pemerintah serta KPPU sendiri. IKU KPPU merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Berikut IKU KPPU dapat dilihat dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.5	4.7	4.7	4.9	5.0
	1.2 Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	95%	100%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	75	78	79	80	90

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

### C. TARGET KINERJA TAHUN 2023

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) KPPU Tahun 2023 dimulai sejak awal tahun 2022 yang mendasarkan pada RKP 2023 dan Renstra KPPU 2020-2024. Pada proses penyusunan Renja/RKP TA 2023 telah dilakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga oleh

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tersebut dilakukan pembahasan dalam berbagai forum internal maupun eksternal. Hasil pembahasan terkait target kinerja dan rincian program tersebut telah disepakati dan disampaikan dalam forum *Trilateral Meeting* dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, KPPU mendapat pagu anggaran pada Pagu Awal TA 2023 sebesar **Rp 113.129.034.000,-** (seratus tiga belas miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Pagu Akhir menjadi sebesar **Rp 122.534.805.000,-** (seratus dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Rincian Alokasi Anggaran KPPU TA 2023

<b>Program</b>	<b>Pagu Awal (Rp)</b>	<b>Pagu Akhir (Rp)</b>
Program Pengawasan Persaingan Usaha	<b>22.078.972.000</b>	<b>28.324.790.000</b>
Program Dukungan Manajemen	<b>19.477.219.000</b>	<b>22.337.172.000</b>
Belanja Pegawai	<b>45.444.622.000</b>	<b>45.444.622.000</b>
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	<b>26.128.221.000</b>	<b>26.428.221.000</b>
<b>Total</b>	<b>113.129.034.000</b>	<b>122.534.805.000</b>

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Rencana Kerja Pembangunan (RKP/Renja) TA 2023 telah sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2023
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.9
	1.2 Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	95%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	80

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja KPPU TA 2023 telah disepakati pada bulan Januari 2023 dan diperbarui setiap triwulan untuk memastikan bahwa kinerja telah disesuaikan dengan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang direncanakan. Sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB maka perlu dilakukan penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif dan meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik. KPPU menyusun pemutakhiran/penyesuaian Perjanjian Kinerja yang memperhatikan capaian kinerja yang dilaporkan pada Laporan Kinerja pada tahun sebelumnya (TA 2022) terutama realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Kinerja pada level unit kerja Eselon II berisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, target yang dirincikan, dan target pemutakhiran pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama KPPU pada Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

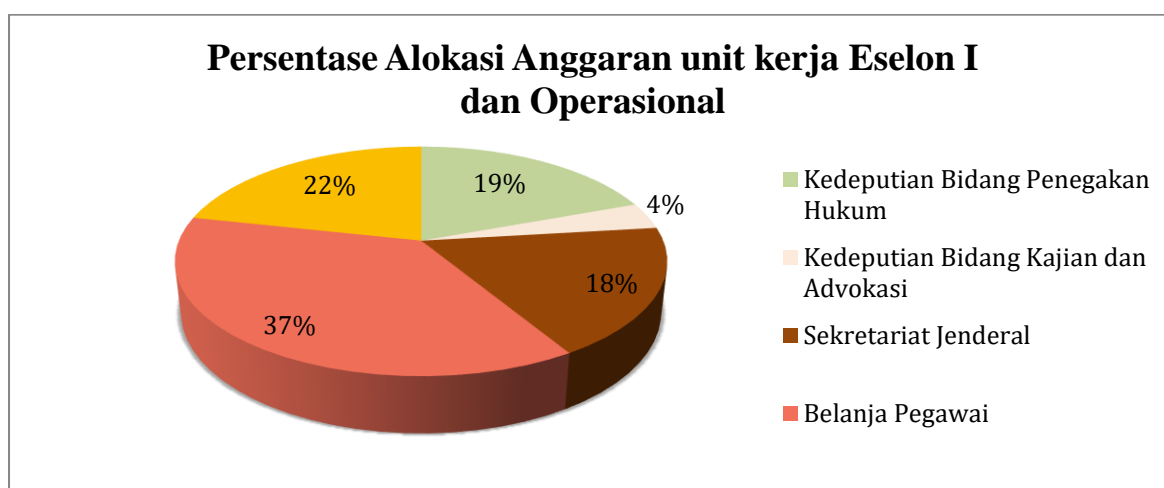
Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Renstra 2023	Target Pemutakhiran 2023
1. Terwujudnya kepastian hukum	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai	4.9	4.9

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Renstra 2023	Target Pemutakhiran 2023
persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)		
	1.2 Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	95	100%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	80	80

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

Rincian alokasi anggaran untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) Sasaran Strategis KPPU TA 2023 telah dijelaskan sebelumnya.

Berikut adalah alokasi anggaran per unit kerja Eselon I KPPU TA 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 2.6 Persentase Alokasi Anggaran per Unit Eselon I dan Operasional KPPU TA 2023

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran per Unit Kerja Eselon I dan Operasional KPPU TA 2023

Unit Eselon I		Pagu Akhir (Rp)
1	Kedepuitian Kajian dan Advokasi	4.578.542.000,-
2	Kedepuitian Penegakan Hukum	23.746.248.000,-
3	Sekretariat Jenderal	22.337.172.000,-
	Belanja Pegawai	44.444.622.000,-
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.428.221.000,-
<b>Total</b>		<b>122.543.805.000,-</b>


Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

### **Pengukuran Kinerja**

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran KPPU, secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangannya ataupun kendalanya dalam e-Monev dan untuk level K/L dan Eselon I memanfaatkan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. SMART merupakan sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, sedangkan e-Monev merupakan sistem informasi di bawah BAPPENAS.

Berdasarkan kebijakan internal KPPU, maka untuk terlaksananya tertib administrasi, maka setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bersama pejabat struktural setingkat Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada masing – masing Eselon I. Tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:



- 
1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
  2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
  3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran;
  4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran;
  5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
  6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja;
  7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Dasar formula penghitungan pengukuran kinerja tingkat lembaga yaitu KPPU untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis dijelaskan dalam 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 92.2/SJ/Kep/VII/2023 tentang Penetapan Indikator Utama Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
2. Keputusan Deputi Kajian dan Advokasi Nomor 16/DKA/Kep/VII/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1602/DH/Kep/VII/2023 tentang Penetapan Indikator Utama Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

# Akuntabilitas Kinerja



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TA 2023

#### 1) Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja tingkat lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) TA 2023 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Ke-3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut telah mencapai target sebesar 100%. Berikut ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada setiap Sasaran Strategis sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:


Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat					
1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	Indeks	4.9	4.91	100%	●
1.2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	Persentase	100%	100%	100%	●
2.	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>					
2.1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	Indeks	80	80.39	100%	●

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target





Untuk rekapitulasi realisasi anggaran dan target output (KRO/RO) Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Pengawasan Persaingan Usaha dan kegiatan pendukung operasional Prioritas Nasional yang masuk pada Program Dukungan Manajemen dapat dilihat Lampiran III.

## 2) Uraian Kinerja

Uraian kinerja atas 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi, yaitu:

- a. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1–7); dan
- b. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku.

Uraian kinerja atas 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut:

### **1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat**

#### **1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)**

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (1.1): Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1–7) diukur dengan formula penghitungan yaitu:

### Survei Indeks Persepsi Persaingan Usaha\*

\*Pengukuran indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan survei persepsi terhadap pelaku usaha, pengambil kebijakan dan akademisi dengan menggunakan dimensi dan indikator dalam persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan lima indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk. Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan. Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas. Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input. Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan memfasilitasi monopoli. Dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha. Survei terhadap 34 provinsi dengan responden yang mewakili institusi seperti Kadin, Akademisi, Bank Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan baik bobot sama maupun bobot dari *principal component analysis*. Proses penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan metode *Additive Aggregation Method* (AAM).

Pada tahun 2023, nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999, Indeks Persepsi Persaingan Usaha dengan skala 1-7) untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu sebesar 100% yang terealisasi 4.91 (Indeks skala 1-7) dari target 4.9 (Indeks skala 1-7) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2023 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)	4.9	4.91	4.87	5.0

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024 (data diolah, 2023)

Pencapaian *outcome* pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha yang menjadi Indikator Kinerja Utama KPPU melalui pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Kedeputusan Bidang Kajian dan Advokasi yang dilakukan melalui pelaksanaan survei indeks persepsi persaingan usaha yang dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diagregasi melalui pengukuran persaingan usaha di setiap provinsi.

Hasil survei menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4,91 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,87. Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 mendorong peningkatan iklim persaingan usaha yang tercermin dari peningkatan indeks yang dihasilkan pada tahun 2023. Secara lebih detil, skor dimensi dari komponen pembentuk indeks persaingan usaha yang mengalami

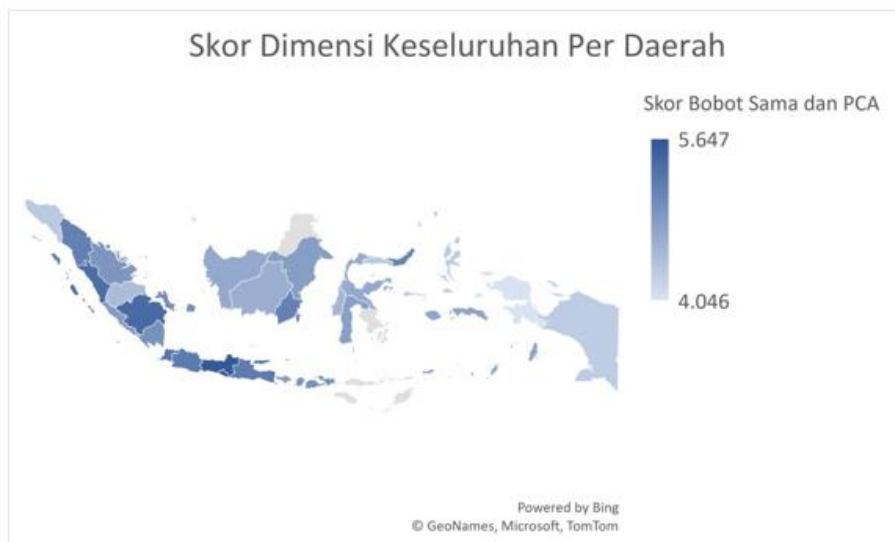




kenaikan, adalah dimensi perilaku, kinerja, regulasi, dan penawaran. Dimensi SCP tahun ini memiliki kontribusi sebesar 38.4 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Secara umum, indeks persaingan usaha di daerah pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan pada daerah yang termasuk 10 (sepuluh) persaingan usaha yang tinggi dan 10 (sepuluh) persaingan usaha yang rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan 10 (sepuluh) daerah yang memiliki persaingan usaha tertinggi terdiri menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA adalah atas Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, 10 (sepuluh) daerah dengan persaingan usaha terendah berada pada Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, dan Papua Barat.

Sektor-sektor yang termasuk masing-masing dalam 10 (sepuluh) sektor dengan persaingan usaha yang tinggi dan rendah terdapat juga perubahan. Pada tahun 2023, berikut merupakan 10 (sepuluh) sektor yang memiliki persaingan usaha tertinggi menggunakan bobot PCA, yaitu Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan *Real Estate*; dan Industri Pengolahan. Sedangkan, 3 (tiga) sektor dengan persaingan usaha terendah berada pada sektor Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Pengadaan Listrik dan Gas. Hasil skor bobot indeks persaingan usaha per provinsi menggunakan dimensi keseluruhan baik dengan bobot sama atau bobot PCA berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat dijelaskan pada Gambar 3.1 dan Grafik 3.1 sebagai berikut.




Gambar 3.1 Peta Persaingan Usaha di Provinsi  
di Indonesia TA 2023

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU, 2023

Jika dilihat dari sebaran provinsi pada Gambar 3.1 tersebut maka dari hasil skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi baik menjumlahkan dengan bobot sama atau bobot PCA, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- b. Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)  
Terdapat 4 provinsi dengan persaingan cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama dan bobot PCA meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara.
- c. Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)  
Terdapat 24 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Selatan.
- d. Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)  
Terdapat sekitar 6 provinsi yang masuk dalam kategori



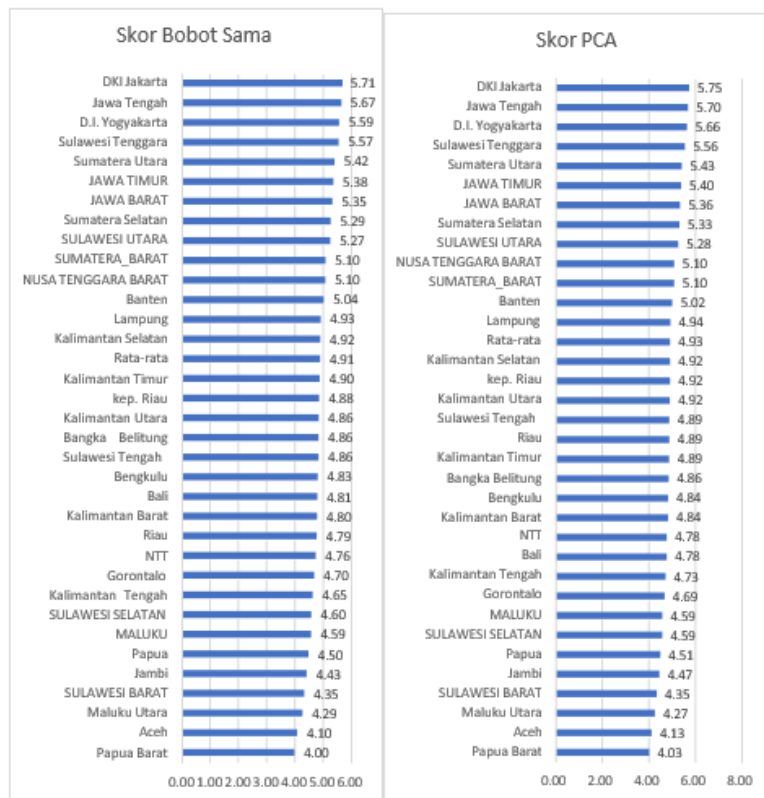
persaingan yang moderat meliputi Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh dan Papua Barat.

- e. Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)  
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah.
- f. Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.
- g. Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

Skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA memberikan kesimpulan yang sama meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara sebagai 5 provinsi dengan skor persaingan usaha tertinggi seluruh dimensi, baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama. Kemudian, dari Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA menghasilkan 13 provinsi yang berada diatas skor rata-rata dan 21 provinsi yang berada dibawah skor rata-rata.

Provinsi yang memiliki skor diatas rata-rata meliputi Provinsi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Banten dan Lampung. Sedangkan, provinsi yang berada dibawah skor rata-rata meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, NTT, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh dan Papua Barat.

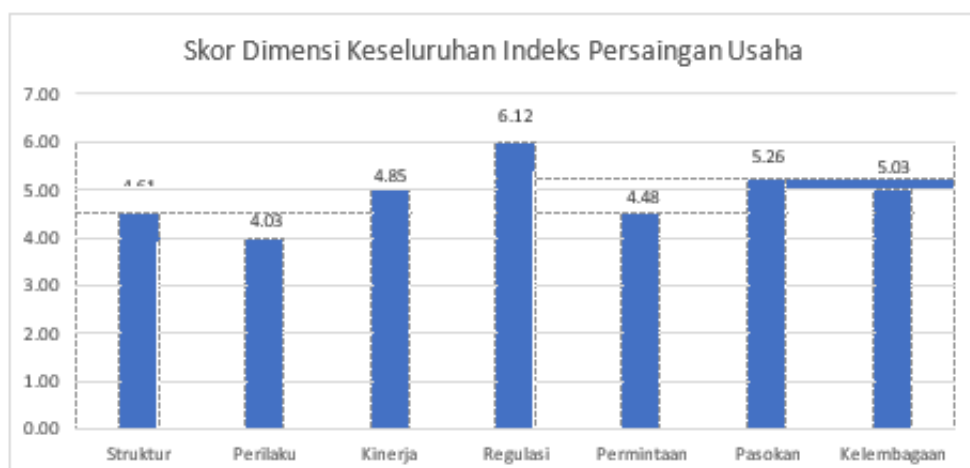




Gambar 3.2 Grafik Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot Sama Tingkat Provinsi di Indonesia TA 2023

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU, 2023

Hasil rata-rata skor indeks persaingan usaha per dimensi berdasarkan dimensi keseluruhan dijelaskan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 3.3 Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU, 2023

Jika dilihat dari masing-masing dimensi berdasarkan Grafik 3.3, maka dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi bukan terbesar dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi persaingan usaha yang sehat.

Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.61, 4.03 dan 4.85. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 6.12 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.

## **1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku**

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (1.2): Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku diukur dengan formula penghitungan yaitu:

$$\frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah putusan KPPU yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung pada tahun berjalan

B = Jumlah putusan KPPU yang dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung pada tahun berjalan berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian di KPPU tidak sesuai dengan peraturan hukum acara formil

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1.2) Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ditujukan untuk menindaklanjuti hasil revidi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020.

Berdasarkan penyesuaian (perubahan formula pengukuran IKSS-1.2) tersebut di atas, maka TA 2023, nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu capaian kinerja sebesar 100% atau dengan realisasi sebesar 100% dengan target 100% sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2023  
(Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sesuai dengan Peraturan Berlaku)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024 (data diolah, 2023)



Perhitungan indikator kinerja diatas adalah berdasarkan data litigasi TA 2023, yaitu terdapat 2 (dua) Putusan KPPU pada proses upaya hukum keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung, maka terdapat 1 (satu) Putusan KPPU yang dibatalkan dengan rincian dalam Lampiran II. Terdapat 1 (satu) Putusan KPPU dinyatakan batal/kalah di tingkat Pengadilan Niaga berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut. Hasil amar putusan menerangkan bahwa batal/kalahnya didasarkan karena substansi perkara, bukan karena berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian hukum acara di KPPU yang tidak sesuai peraturan (formil/hukum acara). Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil perhitungan IKSS-1.2 sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah putusan KPPU yang sesuai dengan peraturan berlaku yang diselesaikan pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung pada tahun berjalan} - \text{Jumlah putusan KPPU yang dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian di KPPU tidak sesuai dengan peraturan hukum acara formil}}{\text{Jumlah Keseluruhan Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 - 0}{2} \times 100\% \\ = 100\%$$

Berdasarkan penjabaran penghitungan di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja kedua pada Sasaran Strategis (SS-1.2) Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi dengan capaian kinerja sebesar 100% atau terealisasi sebesar 100% dengan target 100%

Rekapitulasi data litigasi TA 2023 pada proses upaya hukum keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung, maka terdapat 1 (satu) Putusan KPPU yang dibatalkan dengan rincian yang dapat dilihat pada Lampiran II.

## 2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government*

### 2.1 Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)

Uraian kinerja atas 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (2.1) untuk Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government*. Berdasarkan revidi dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020, direkomendasikan formula pengukuran kinerja sehingga formula pengukuran pada IKSS-2.1 tersebut menjadi:

Rata-rata nilai Indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

\*Nilai indeks tersebut dilakukan konversi ke angka indeks IKSS yaitu angka indeks skala 1-100, sehingga akan mendapatkan target nilai indeks ISS TA 2023.

Berdasarkan perubahan formula pengukuran IKSS-2.1 tersebut di atas, maka pada TA 2023 hasil perhitungan rata-rata nilai konversi realisasi nilai IKK terkait layanan Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal yang akan menjadi nilai IKSS-2.1: Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100) untuk mencapai Sasaran Strategis (SS-2) yaitu Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government* yaitu tercapai kinerja 100% atau dengan terealisasi poin nilai sebesar 80.39 dengan target 80 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2023 (Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
1	Terwujudnya kualitas layanan	Indeks Tingkat efektivitas	80	80.39	77.73	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
	manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)				

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024 (data diolah, 2023)

Pencapaian outcome pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* melalui formula pengukuran yaitu rata-rata nilai Indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nilai IKK terkait layanan pada Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal terdapat 12 (dua belas) IKK dengan nilai Indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia
2. Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia
3. Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN
4. Indeks kepuasan layanan umum
5. Indeks kepuasan atas layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan
6. Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah
7. Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran
8. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Skala 1-5)
9. Indeks Keamanan Informasi (Skala 1-645)
10. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional
11. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi
12. Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik



Selanjutnya dari data realisasi nilai indeks dari 12 (dua belas) IKK terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan konversi ke angka indeks IKSS yaitu angka indeks skala 1-100, dengan data konversi yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Nilai Indeks terkait layanan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Sekretariat Jenderal TA 2023

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target 2023 (skala 1-7)	Realisasi 2023 (skala 1-7)	Konversi Realisasi Nilai IKK ke Nilai IKSS-2.1 (skala 1-100)
1	Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia	Indeks	5.53	5.89	81.685
2	Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia	Indeks	5.97	5.98	83.17
3	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN	Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan RKBMN	5.3	5.60	76.90
4	Indeks kepuasan layanan umum	Indeks layanan	5.61	5.61	77.065
5	Indeks kepuasan atas layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan	Indeks layanan	5.50	5.78	79.87
6	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah	Indeks layanan	5.61	5.61	77.065
7	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran	Indeks	6.18	6.20	86.80
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Skala 1-7)	Indeks	4.54	6.36	89.44
9	Indeks Keamanan Informasi (Skala 1-645)	Indeks	290	4.12	52.48
10	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional	Indeks	6.19	6.15	85.98
11	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi	Indeks	6.23	6.25	87.63

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target 2023 (skala 1-7)	Realisasi 2023 (skala 1-7)	Konversi Realisasi Nilai IKK ke Nilai IKSS-2.1 (skala 1-100)
12	Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik	Indeks	6.08	6.07	84.655
<b>Rata-Rata Konversi dari Nilai IKK</b>					<b>80.39</b>

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Sejalan dengan adanya perbaikan formula Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-2.1). maka dilakukan konversi terhadap 12 (dua belas) nilai indeks data capaian IKK sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.5 di atas. Pada nilai indeks untuk IKK: Indeks Keamanan Informasi yang terealisasi sebesar 52.48 (konversi) yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 43.73 (konversi) belum menunjukkan angka indeks yang baik. Dari hasil IKK: Indeks Keamanan Informasi yaitu analisa hasil evaluasi akhir perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) melalui penilaian mandiri dimana nilai Indeks KAMI menunjukkan level status: “Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar”. Untuk menaikkan poin nilai KAMI pada level status ini maka KPPU perlu menyiapkan instrumen kebijakan. prosedur. rencana program peningkatan keamanan informasi.

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas pencapaian *outcome* pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* pada TA 2023 masih menggunakan formula pengukuran yaitu rata-rata nilai indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nilai IKK terkait layanan pada Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal terdapat 12 (dua belas) IKK dengan nilai indeks. penggunaan formula yang sama dengan TA 2022 karena untuk dapat memperoleh Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* TA 2023 sehingga nilai indeks yang didapatkan dapat dibandingkan dengan formula penghitungan yang sama. Capaian Indikator SS pada Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* TA 2023 yaitu tercapai kinerja 100% atau dengan terealisasi poin nilai sebesar 80.39 dengan target 80. Upaya perbaikan pemberian layanan birokrasi untuk memenuhi standarisasi terkait layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Untuk perbaikan peningkatan Indikator pada Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* pada tahun selanjutnya akan melakukan koordinasi tindak lanjut dengan unit kerja terkait dan Kementerian PAN-RB untuk dapat memberikan pendampingan dan konsultasi dalam upaya perbaikan dalam rangka mengefektifkan penerapan layanan publik yang berbasis *digital*.

Pada TA 2023 menjadi lanjutan tahun transisi untuk pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* menuju formula pengukuran baru yang memanfaatkan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Penilaian indeks SPBE di KPPU telah dilaksanakan 3 (tiga) kali yaitu:

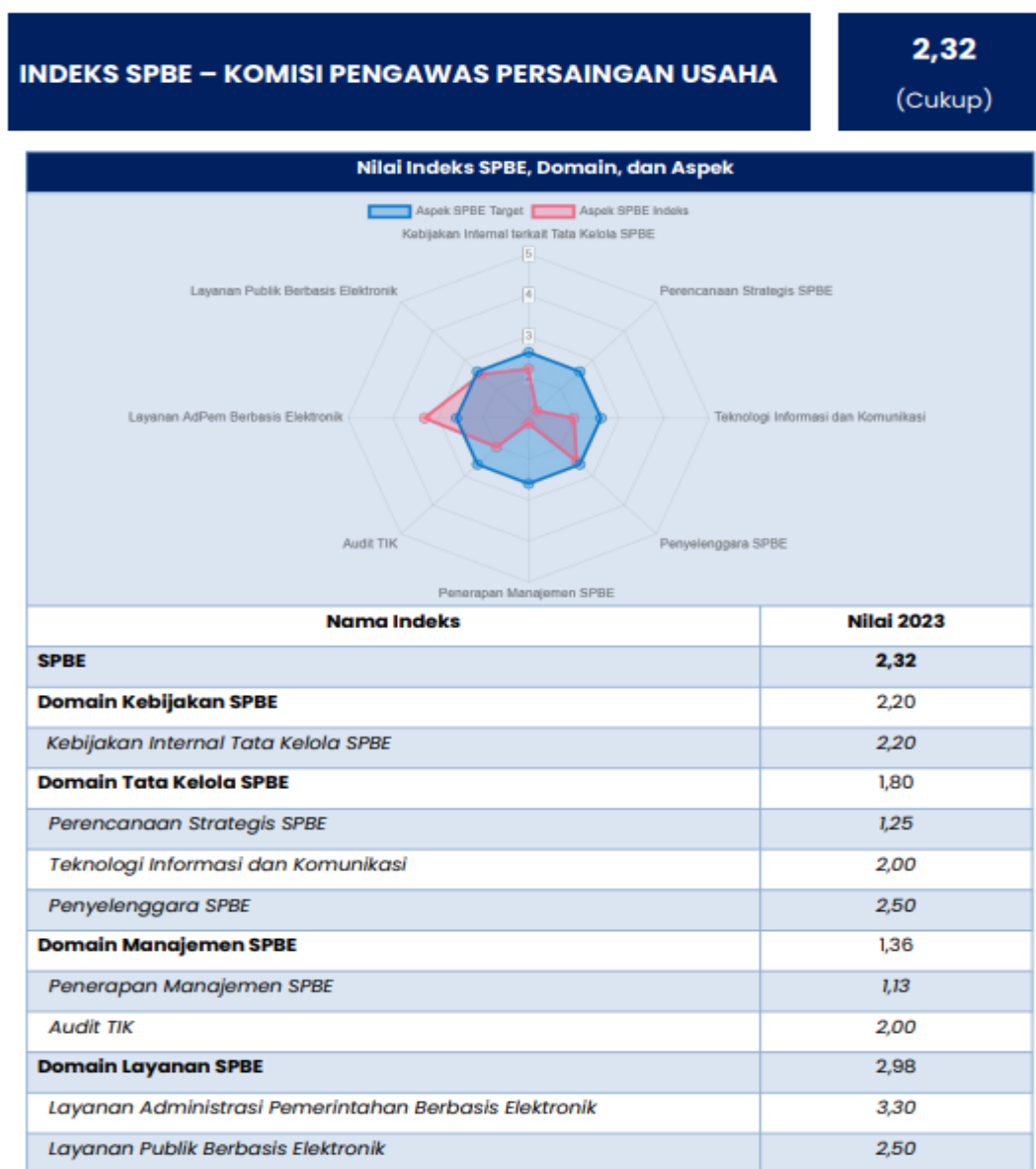
Tahun	Nilai Indeks SPBE
2021	1.18
2022	1.39
2023	2.32

Terkait kegiatan pengukuran Indeks SPBE tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar yang dilaksanakan oleh KemenpanRB. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi



Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. disampaikan bahwa hasil penilaian KPPU pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebesar 2.32 dalam kategori Cukup. Memperhatikan skala pengukuran Indeks SPBE yaitu 1-5 dengan target nasional nilai Indeks sebesar 2.6 pada tahun 2025. Hasil penilaian Indeks SPBE Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023 sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3.4 berikut:



Gambar 3.4 Grafik Hasil Penilaian Indeks SPBE Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023

Sumber: Kemenpan dan RB, 2023

Hasil penilaian Indeks SPBE TA 2023 di KPPU dengan kategori Cukup tersebut, perlu perbaikan dan pemenuhan kerangka regulasi di lingkungan KPPU, penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK. Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Untuk KPPU dapat melakukan konsultasi dan pendampingan kepada KemenpanRB terkait upaya peningkatan nilai Indeks SPBE tersebut.

## **B. ANALISIS EFISIENSI**

Pada tahun 2023, pencapaian Sasaran Strategis KPPU untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha TA 2023 yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja SS-1.1 sebesar 100%. sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 4.565.604.285.- dari total anggaran sebesar Rp 4.578.542.000.- (99.72%)
2. Capaian Indikator Kinerja SS-1.2 sebesar 100%. sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 23.558.350.482.- dari total anggaran sebesar Rp 23.746.248.000.- (99.21%)
3. Capaian Indikator Kinerja SS-2 sebesar 100%. sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 22.263.249.349.- dari total anggaran sebesar Rp 22.337.172.000.- (99.67%).

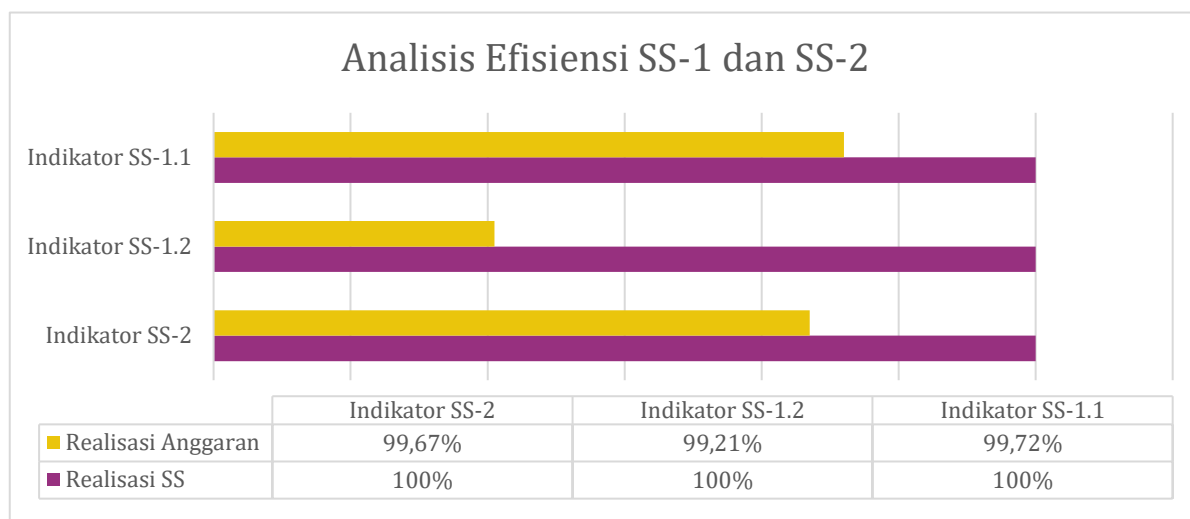
Dalam SS-2 ini, terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 45.444.622.000.- dengan realisasi anggaran sebesar 97.13% atau sebesar Rp 44.141.844.214.- dan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 26.428.221.000.- dengan realisasi sebesar 98.96% atau sebesar Rp 26.152.792.182.-.

Terkait efisiensi pemanfaatan penganggaran pada TA 2023, KPPU melakukan penggunaan persetujuan relaksasi *Automatic Adjustment* (AA) Anggaran sebesar Rp 4.249.751.000.- pada Semester II yang dilaksanakan per tanggal 16 Agustus 2023 dengan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-470/AG/AG.3/2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Khususnya terkait Relaksasi Anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Efisiensi pada kegiatan Klarifikasi Pengawasan Kemitraan dengan penambahan output sebesar 25% dan relaksasi pemanfaatan anggaran sebesar 32.62%.
2. Efisiensi pada kegiatan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha dengan penambahan output sebesar 25% dan relaksasi pemanfaatan anggaran sebesar 16.63%.
3. Efisiensi pada kegiatan Pemberkasan Perkara Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan penambahan output sebesar 50% dan relaksasi pemanfaatan anggaran sebesar 47.64%.
4. Efisiensi pada kegiatan Penyelidikan Dugaan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi dengan penambahan output sebesar 100% dan relaksasi pemanfaatan anggaran sebesar 35.76%.

Berikut adalah Analisis Efisiensi untuk masing-masing Sasaran Strategis:



Gambar 3.5 Grafik Analisis Efisiensi SS-1 dan SS-2

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Rekapitulasi perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.6 berikut:



Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	2020		2021		2022		2023		2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1.	SS-1: Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha	1.1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha	4.5	4.5	4.7	4.81	4.7	4.87	4.9	4.91	5.0
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80	111	85	100	90%	100%	100%	100%	100
2.	SS-2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government	2.1. Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government	75	103	78	76	79	77	80	80.39	90

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.6 di atas bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang mengalami peningkatan nilai.

Pada IKSS 1.1 nilai indeks dihitung menggunakan bobot sama dan bobot PCA. hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional tahun 2023 termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4.91 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4.87. Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 mendorong peningkatan iklim persaingan usaha yang tercermin dari peningkatan indeks yang dihasilkan pada tahun 2023 ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Skor Indeks Persaingan Usaha Periode 2019-2023

Dimensi	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B
Struktur	4.24	4.24	4.34	4.34	4.49	4.49	4.66	4.66	4.61	4.61
Perilaku	3.90	3.90	3.58	3.58	3.73	3.73	3.96	3.96	4.03	4.03
Kinerja	4.70	4.70	4.86	4.86	4.86	4.86	4.81	4.81	4.85	4.85
Regulasi	5.95		6.12		6.30		5.69		6.12	
<b>Demand</b>	<b>4.35</b>		<b>4.06</b>		<b>4.15</b>		<b>4.55</b>		4.48	
<b>Supply</b>	<b>5.14</b>		<b>4.94</b>		<b>5.16</b>		<b>5.16</b>		5.26	

Dimensi	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B
Kelembagaan	4.74		4.61		4.96		5.23		5.03	
<b>Skor Bobot Sama</b>	<b>4.72</b>	<b>4.23</b>	<b>4.65</b>	<b>4.26</b>	<b>4.81</b>	<b>4.36</b>	<b>4.87</b>	<b>4.48</b>	<b>4.91</b>	<b>4.50</b>
<b>Skor PCA</b>	<b>4.75</b>	<b>4.28</b>	<b>4.50</b>	<b>4.39</b>	<b>4.67</b>	<b>4.44</b>	<b>4.85</b>	<b>4.58</b>	<b>4.92</b>	<b>4.59</b>

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU. 2023

Perhitungan kinerja tersebut di atas didasarkan pada capaian output yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja (Renja/RKP) Tahunan khususnya TA 2023. Penjelasan capaian output kegiatan (dalam bentuk *matriks table*) pada Program Pengawas Persaingan Usaha TA 2023 dijelaskan pada Lampiran II pada Laporan Kinerja ini.

Capaian kinerja TA 2023 yang ditunjukkan pada capaian IKSS 1.1, IKSS 1.2 dan IKSS 2.1 mengalami kenaikan realisasi jika dibandingkan tahun 2022. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan KPPU dalam tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sebagaimana berikut:

1. Pembaruan peraturan KPPU/Peraturan Ketua:
  - a. Peraturan Ketua KPPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Persetujuan Komisi atas Permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda Secara Bertahap dalam Jangka Waktu Tertentu, disahkan dan berlaku pada tanggal 4 Januari 2023.
  - b. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disahkan dan berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
  - c. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan dan berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
  - d. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, disahkan dan berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
  - e. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan dan berlaku tanggal 31 Maret 2023.
  - f. Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan berlaku tanggal 31 Maret 2023.
- g. Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik dan berlaku tanggal 31 Maret 2023.
  - h. Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha dan berlaku tanggal 31 Maret 2023.
2. Penyesuaian terhadap dokumentasi dan informasi hukum dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
  3. Penyusunan Peraturan Presiden terkait Kelembagaan KPPU.
  4. Terbitnya izin Prakarsa sesuai dengan Surat Presiden Nomor B-555/M/D-1/HK.03.00/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Prakarsa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Upaya tersebut di atas adalah bagian dari akuntabilitas kinerja sehingga capaian kinerja tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha sebagai Indikator Kinerja Utama KPPU dengan hasil indeks sebesar 4.91. Pada tahun 2023 KPPU juga menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut atas Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan KPPU dari tahun 2012 sampai dengan 2022.

Selanjutnya untuk rincian target Output (KRO/RO) Kegiatan di KPPU TA 2023 yang tergabung pada Program Pengawasan Persaingan Usaha merupakan Kegiatan Pendukung Prioritas Nasional khususnya pada PN-1 TA 2023 dapat dilihat pada Lampiran II.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023. KPPU akan:

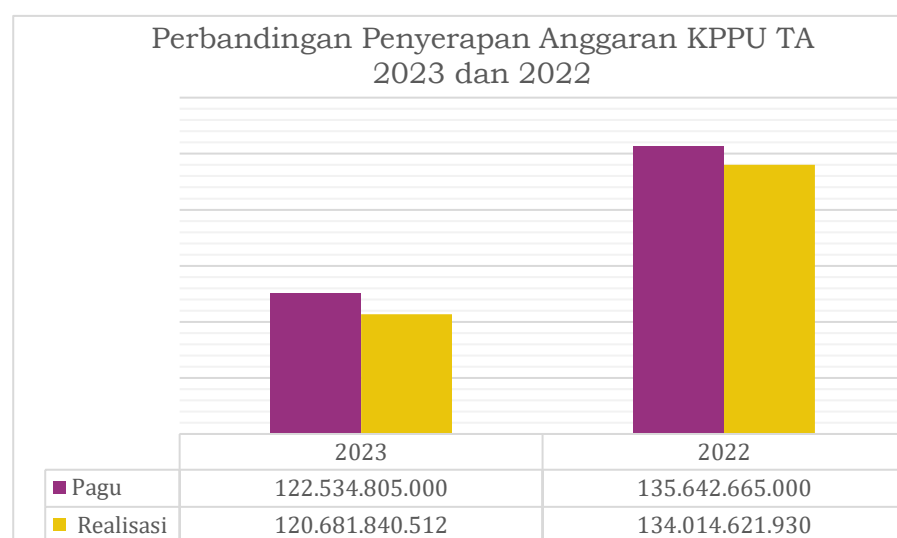
1. Sinkronisasi peraturan internal KPPU dengan Peraturan Presiden terkait Kelembagaan KPPU.
2. Digitalisasi Layanan untuk percepatan tindak lanjut laporan dari masyarakat.
3. Penyiapan dokumen usulan kerangka regulasi terkait amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Rancangan RPJMN 2025-2029.



4. Penyusunan kembali visi misi Komisioner periode 2024-2029.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran pada 2 (dua) program, yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen pada TA 2023 sebesar Rp 120.681.840.512.- atau mencapai 98.49% dari total pagu sebesar Rp 122.534.805.000.-. Persentase realisasi ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 realisasi anggaran mencapai 98.80% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 134.014.621.930.- dari total pagu sebesar Rp 135.642.665.000.-. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2023 dan 2022 sebagaimana terlihat dalam Grafik berikut.



Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran KPPU

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

Alokasi anggaran KPPU TA 2023 untuk melaksanakan SS-1 sebesar Rp 25.452.214.000.- atau 50.24% dari total anggaran KPPU non-operasional (belanja operasional dan belanja pegawai). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPPU dalam lingkup SS-1 adalah kegiatan utama (*core*) yang juga memerlukan Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi. Sedangkan kondisi struktur anggaran selain untuk melaksanakan SS-1, juga ada SS-2 yang masuk kedalam anggaran *supporting* yang pada tahun 2023 adalah sebesar 49.76% atau Rp 25.209.748.000.- dari total anggaran KPPU non-operasional (belanja

operasional dan belanja pegawai). Perbandingan alokasi anggaran di *Core* dan *Supporting* TA 2023 dapat dilihat pada Lampiran III.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis TA 2023


Sasaran Strategis/Program		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>			
	SS-1: Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha	28.324.790.000	28.123.954.767	99.29%
2	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
	SS-2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	22.337.172.000	22.263.249.349	99.67%
	Belanja Operasional			
	Belanja Pegawai	45.444.622.000.-	44.141.844.214	97.13%
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.428.221.000.-	26.152.792.182	98.96 %
<b>Total</b>		<b>122.534.805.000.-</b>	<b>120.681.840.512</b>	<b>98.49%</b>

Sumber: KPPU (data diolah, 2023)

#### D. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan dan kendala yang dihadapi KPPU selama tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Tidak terdapat dukungan sumber daya dalam menjalankan kontribusi target PN yang menjadi target nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga lain.
2. Tidak terdapat jabatan fungsional yang belum memiliki pembina kepegawaian.
3. Terdapat *Automatic Adjustment* anggaran sebesar 18% dari pagu anggaran kegiatan pada TA 2023.
4. Pelaksanaan layanan belum 100% dialihkan ke layanan digital sehingga belum menjangkau wilayah yang meliputi 38 Provinsi.

- 
5. Terdapat perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan turunannya.



# Penutup



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN KINERJA TAHUNAN**

Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah hasil kerja bersama unit kerja baik dari unit teknis maupun unit pendukung. Seluruh proses dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah untuk memenuhi target kinerja pada Indikator Kinerja RPJMN 2020 – 2024 yaitu angka pada Indeks Persepsi Persaingan Usaha. Kinerja tersebut merupakan kontribusi dukungan KPPU pada RPJMN 2020-2024 pada (PN-1) yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Penyusunan Laporan Kinerja KPPU Tahun 2023 mencantumkan data dan fakta keberhasilan capaian target kinerja KPPU, tantangan yang dihadapi serta kendala dalam mencapai Sasaran Strategis KPPU Tahun 2023. Peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilingkungan KPPU TA 2023 menunjukkan bahwa nilai sebesar 60.23 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada lembaga dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai ini meningkat dari nilai sebelumnya pada tahun anggaran 2022 yang sebesar 50.68 dengan predikat “CC”. Pemenuhan pelaksanaan evaluasi SAKIP tersebut untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Capaian kinerja KPPU tahun 2023 pada masing-masing Indikator Kinerja pada SS-1 dan SS-2 sesuai dengan target yang ditentukan. Data capaian menunjukkan bahwa pada SS-1.1 dan SS-1.2 terlampaui capaiannya sebesar 100%. sedangkan jika dilihat dari capaian realisasi anggaran untuk SS-1.1 dan SS-1.2 masing-masing adalah 99.72% dan 99.21%, dan pada SS-2 capaiannya mencapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran yang efisien yaitu 99.67%.

## **B. RENCANA TINDAK TAHUN BERIKUTNYA**

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 81/P/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan KPPU yang berakhir pada tahun 2023. maka dalam kurun waktu berakhirnya masa jabatan komisioner tersebut maka dilakukan pemilihan untuk anggota komisioner periode 2024-2029. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023. maka rencana tindak tahun berikutnya KPPU akan:

1. Sinkronisasi peraturan internal KPPU dengan Peraturan Presiden terkait Kelembagaan KPPU.
2. Digitalisasi Layanan untuk percepatan tindak lanjut laporan dari masyarakat.
3. Penyiapan dokumen usulan kerangka regulasi terkait amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Rancangan RPJMN 2025-2029.
4. Penyusunan kembali visi misi Komisioner periode 2024-2029.



# KINERJA KPPU TA 2023



## INDEKS PERSAINGAN USAHA

**4,91**

menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022



## PERSENTASE PENEGAKAN HUKUM

**100 %**

penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku sebesar 100% yang terealisasi 100% dari target 100%;

## **98,5 %** REALISASI ANGGARAN TA 2023

Realisasi anggaran KPPU yang terdiri 2 (dua) Program TA 2023 sebesar Rp 120.681.840.512,- atau mencapai 98.5% dari total pagu sebesar Rp 122.534.805.000,-

## OPINI WTP PADA LAPORAN KEUANGAN KPPU

Pada tahun 2023 KPPU juga menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut atas Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan KPPU dari tahun 2012 sampai dengan 2022.



**1. Perjanjian Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Afif Hasbullah

Jabatan : Ketua KPPU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 8 Desember 2023  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua

Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Sasaran Strategis (SS) #1/2</b> <b>Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat</b>		
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja SS</b>	<b>Target 2023</b>
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)	4.9 skala 1-7
2	Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> <b>Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government</b>		
1	Indeks tingkat efektifitas pemanfaatan e-government (percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan kean data)	80 skala 1-100

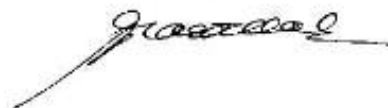
**Program**

108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha  
108.WA. Program Dukungan Manajemen

**Anggaran**

Rp 28.324.790.000,-  
Rp 94.210.015.000,-

Jakarta, 8 Desember 2023  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua



Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Program: Pengawasan Persaingan Usaha</b>		
<b>Sasaran Program #1/2 : Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2023</b>
1	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999 (Skal 1-7)	6.17
2	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 (Skala 1-7)	6

**Program**

108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha

**Anggaran**

Rp 4.578.542.000,-

Ketua KPPU



Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum

Jakarta, Oktober 2023  
Deputi Kajian dan Advokasi



Taufik Ariyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Program:</b> <b>Pengawasan Persaingan Usaha</b>		
<b>Sasaran Program #2/2 :</b> <b>Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2023</b>
1	Prosentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	25%
2	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	100%
3	Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	100%
4	Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	100%
5	Presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	100%
6	Indeks Layanan Kepaniteraan (skala 1-7)	4.53 skala 1-7

**Program**  
108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha

**Anggaran**  
Rp 20.873.672.000,-

Ketua KPPU



Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum

Jakarta, 8 Desember 2023  
Deputi Penegakan Hukum



Setyabudi Yulianto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Program: Dukungan Manajemen</b>		
<b>Sasaran Program #1/2 : Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2023</b>
1	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)	69.96 Skala 1-100
2	Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik	91.35%
3	Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis e-government (dari 5 target)*  *tahun berikutnya merupakan akumulasi dari implementasi sistem SDM berbasis e-government dengan target setiap tahun 1 sistem diimplementasikan , sehingga dalam 5 (lima) tahun Periode Renstra ada 5 (lima) sistem SDM berbasis e-government diimplementasikan	4 sistem
<b>Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2023</b>
1	Persentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi	85.09%
2	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)	5.61 skala 1-7
3	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (skala 1- 7)	5.5 skala 57
4	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	290 (skala 1-645)
5	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (skala 1-7)	6.17 skala 1- 7
6	Indeks Layanan Hukum (skala 1-7)	6.03 skala 1- 7
7	Tingkat Maturitas SPIP (skala 1-5)	Level 4 skala 1-5
8	Opini BPK atas laporan keuangan KPPU	WTP

**Program**

108.WA. Dukungan Manajemen

**Kegiatan**

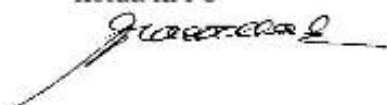
3955. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU

**Anggaran**

Rp 94.210.015.000,-

Rp 2.872.576.000,-

Ketua KPPU



Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum

Jakarta, 18 Desember 2023  
Sekretaris Jenderal



Charles Pandji Dewanto



**2. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep.1/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024**



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR **22** /KPPU/Kep.1/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Program pada unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.

KETIGA : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2020  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 21 /KPPU/Kep.1/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TAHUN 2020-2024

<b>Sasaran Strategis (SS) #1/2</b> <b>Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi</b>	
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> <b>Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui e-government</b>	
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA





LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
 NOMOR 22 /KPPU/Kep.1/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
 TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA UNIT KERJA SETINGKAT ESELON I  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Program:</b>	
<b>Pengawasan Persaingan Usaha</b>	
<b>Sasaran Program #1/2 :</b>	
<b>Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik</b>	
1	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999.
2	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.
<b>Sasaran Program #2/2 :</b>	
<b>Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>	
1	Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
2	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha.
3	Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui Surat Peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.
4	Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti.
5	Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU.
6	Indeks Layanan Kepaniteraan.

<b>Program: Dukungan Manajemen</b>	
<b>Sasaran Program #1/2 : Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU</b>	
1	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU.
2	Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai BAIK.
3	Rasio penerapan tata kelola manajemen perubahan SDM berbasis <i>e-government</i> *  *tahun berikutnya merupakan akumulasi dari implementasi sistem SDM berbasis <i>e-government</i> dengan target setiap tahun 1 sistem diimplementasikan, sehingga dalam 5 (lima) tahun Periode Renstra terdapat 5 (lima) sistem SDM berbasis <i>e-government</i> yang diimplementasikan
<b>Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi</b>	
1	Prosentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi.
2	Indeks layanan umum operasional teknis internal.
3	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan.
4	Indeks Keamanan Informasi.
5	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama.
6	Indeks Layanan Hukum.
7	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
8	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA





## LAMPIRAN II

### 1. Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPU TA 2023 (Sasaran Strategis)

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat					
1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)	Indeks	4.9	4.91	100%	●
2.2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	Persentase	100%	100%	100%	●
2.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui e-government dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal					
2.1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)	Indeks	80	80.39	100%	●

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target

### 2. Penjelasan Indeks Persaingan Usaha TA 2023

#### Kerangka dasar penyusunan Indeks Persaingan Usaha

Konsep atau paradigma yang digunakan sebagai kerangka dasar penyusunan indeks persaingan usaha adalah paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan lima indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk. Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan. Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas. Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input. Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan



memfasilitasi monopoli. Sementara, dimensi terakhir yakni dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha.

Penelitian ini melakukan survei terhadap 34 provinsi dengan responden Kadin, Akademisi, Bank Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor dengan pembobotan sama untuk seluruh indikator atau pembobotan menggunakan *principal component analysis*. Metode yang digunakan untuk penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan metode *Additive Aggregation Method* (AAM).

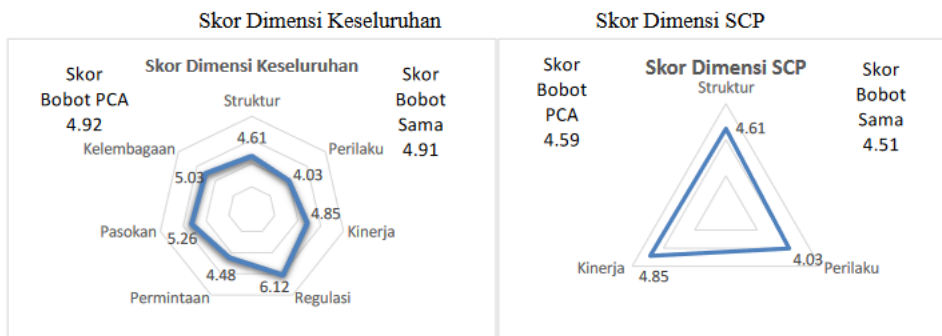
Hasil survei menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Pada tahun 2023, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4,91 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,87. Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 mendorong peningkatan iklim persaingan usaha yang tercermin dari peningkatan indeks yang dihasilkan pada tahun 2023. Secara lebih detil, skor dimensi dari komponen pembentuk indeks persaingan usaha yang mengalami kenaikan, adalah dimensi perilaku, kinerja, regulasi, dan penawaran. Dimensi SCP tahun ini memiliki kontribusi sebesar 38.4 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Tabel 1  
Perbandingan Skor Indeks Persaingan Usaha Tahun 2019 dan 2023

Dimensi	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B	Skor A	Skor B
Struktur	4.24	4.24	4.34	4.34	4.49	4.49	4.66	4.66	4.61	4.61
Perilaku	3.90	3.90	3.58	3.58	3.73	3.73	3.96	3.96	4.03	4.03
Kinerja	4.70	4.70	4.86	4.86	4.86	4.86	4.81	4.81	4.85	4.85
Regulasi	5.95		6.12		6.30		5.69		6.12	
<i>Demand</i>	4.35		4.06		4.15		4.55		4.48	
<i>Supply</i>	5.14		4.94		5.16		5.16		5.26	
Kelembagaan	4.74		4.61		4.96		5.23		5.03	
<b>Skor Bobot Sama</b>	<b>4.72</b>	<b>4.23</b>	<b>4.65</b>	<b>4.26</b>	<b>4.81</b>	<b>4.36</b>	<b>4.87</b>	<b>4.48</b>	<b>4.91</b>	<b>4.50</b>
<b>Skor PCA</b>	<b>4.75</b>	<b>4.28</b>	<b>4.50</b>	<b>4.39</b>	<b>4.67</b>	<b>4.44</b>	<b>4.85</b>	<b>4.58</b>	<b>4.92</b>	<b>4.59</b>

Pada Tabel 1 menunjukkan perbandingan skor indeks persaingan usaha baik menggunakan dimensi keseluruhan maupun dimensi SCP. Dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.87 pada tahun 2022 menjadi 4.91 pada tahun 2023. Kemudian, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.48 pada tahun 2022 menjadi sebesar 4.51 pada tahun 2023. Kemudian indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan dan bobot PCA mengalami kenaikan dari sebesar 4.85 pada tahun 2022 menjadi 4.92 pada tahun 2023. Selanjutnya, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot PCA, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.58 pada tahun 2022 menjadi 4.59 pada tahun 2023. Dari hasil tersebut terlihat bahwa secara umum indeks persaingan usaha mengalami kenaikan baik menggunakan indikator SCP maupun

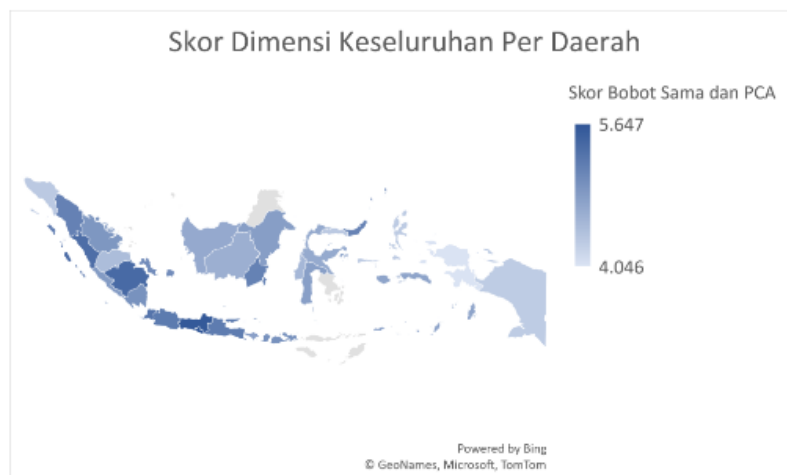
indikator keseluruhan. Dapat dilihat bahwa skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan mengalami kenaikan pada indikator perilaku, kinerja, regulasi, permintaan dan kelembagaan pada tahun 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sudah mulai kembali kepada normal kecuali pada aspek perilaku. Dimensi perilaku menjelaskan sekitar 18.7% variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA.




Gambar 1 Indeks Persaingan Usaha Nasional

Indeks persaingan usaha nasional berdasarkan rata-rata indeks persaingan usaha daerah dan seluruh sektor ekonomi ditunjukkan oleh Gambar 1. Dari Gambar 1 terlihat bahwa indeks persaingan usaha berada di rentang 4.50 - 4.92 berdasarkan dimensi SCP maupun dimensi keseluruhan baik menggunakan bobot PCA maupun bobot yang sama. Berdasarkan dimensi SCP, persaingan usaha dikategorikan ke dalam persaingan usaha moderat hingga sedikit tinggi. Persaingan usaha dikategorikan menjadi persaingan usaha sedikit tinggi ketika menggunakan dimensi secara keseluruhan. Kemudian aspek perilaku merupakan dimensi yang dipersepsikan memiliki skor paling kecil yaitu 3.96. Masalah perilaku industri menjadi faktor yang mendorong indeks persaingan usaha ke arah moderat. Beberapa indikasi perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kartel terjadi pada tahun 2022-2023. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian bagi KPPU dan pengambil kebijakan untuk mendorong agar tercipta perilaku industri yang lebih kompetitif baik di daerah maupun di nasional.

**Indeks Persaingan Usaha Daerah dan Sektoral Menggunakan Seluruh Dimensi Skor Rata-Rata Dimensi Persaingan Usaha Per Daerah**



Gambar 2 Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia

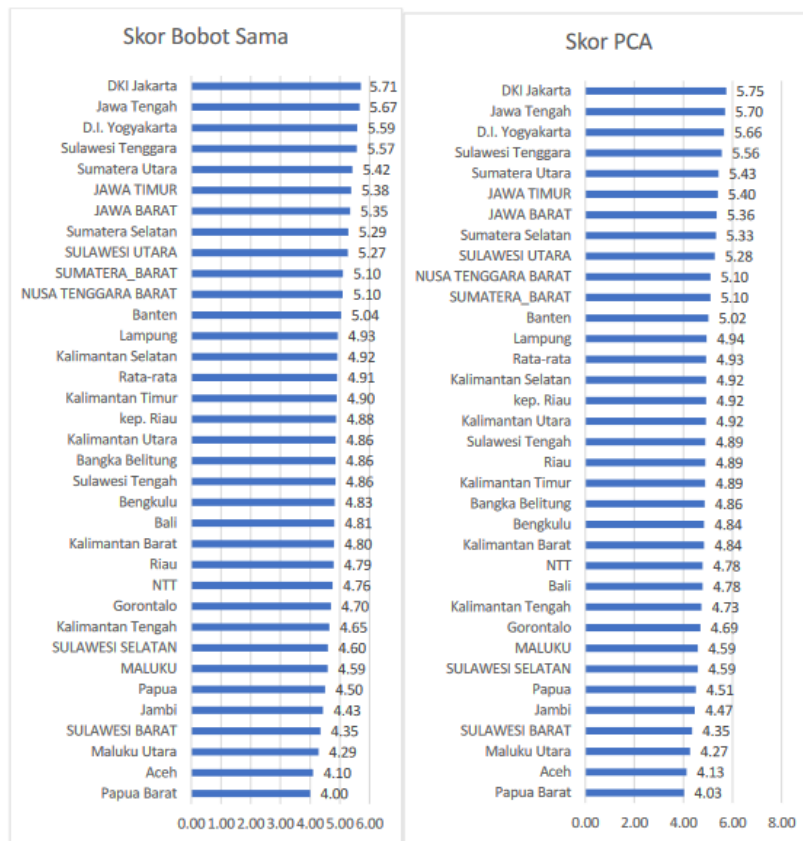


Gambar 2 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha berdasarkan provinsi menurut persepsi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat. Dari hasil skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi baik menjumlahkan dengan bobot sama atau bobot PCA, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)  
Terdapat 4 provinsi dengan persaingan cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama dan bobot PCA meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara.
- Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)  
Terdapat 24 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Selatan.
- Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)  
Terdapat sekitar 6 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh dan Papua Barat.
- Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)  
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah
- Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.
- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

Skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA memberikan kesimpulan yang sama meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara sebagai 5 provinsi dengan skor persaingan usaha tertinggi seluruh dimensi, baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama. Kemudian, dari Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA menghasilkan 13 provinsi yang berada diatas skor rata-rata dan 21 provinsi yang berada dibawah skor rata-rata. Provinsi yang memiliki skor diatas rata-rata meliputi Provinsi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Banten dan Lampung. Sedangkan, provinsi yang berada dibawah skor rata-rata meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, NTT, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh dan Papua Barat.

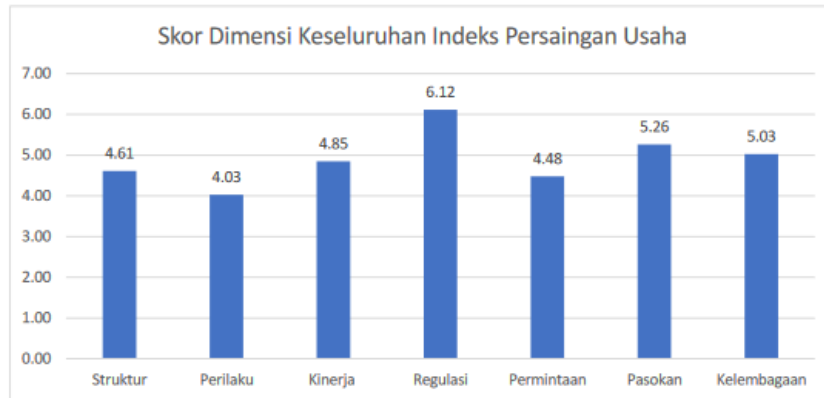




Grafik 1 Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot sama

**Skor Rata-Rata Dimensi Persaingan Usaha Per Dimensi**

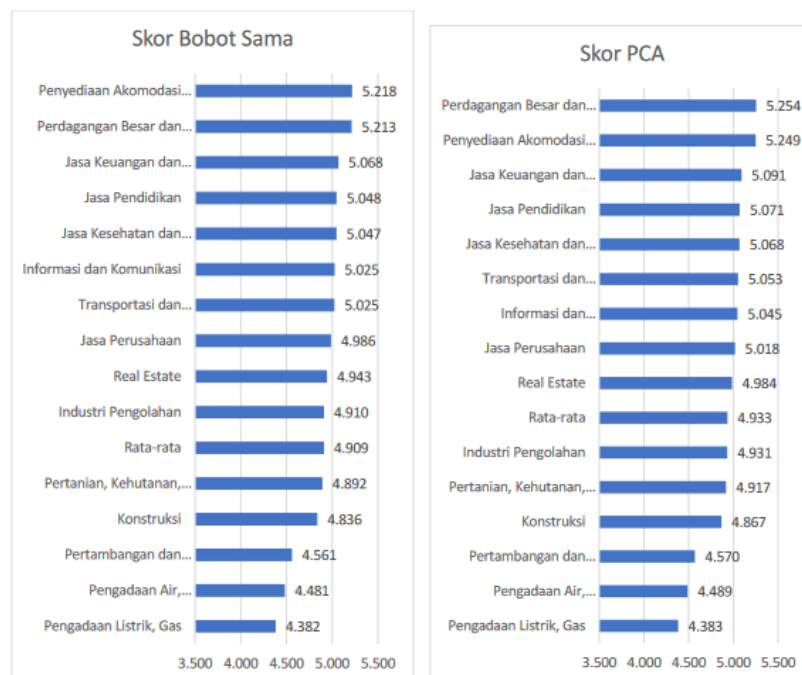
Jika dilihat dari masing-masing dimensi (Grafik 2), dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi bukan terbesar dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.61, 4.03 dan 4.85. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 6.12 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.



Grafik 2 Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha

### **Hasil Indeks Persaingan Usaha Per Sektor**

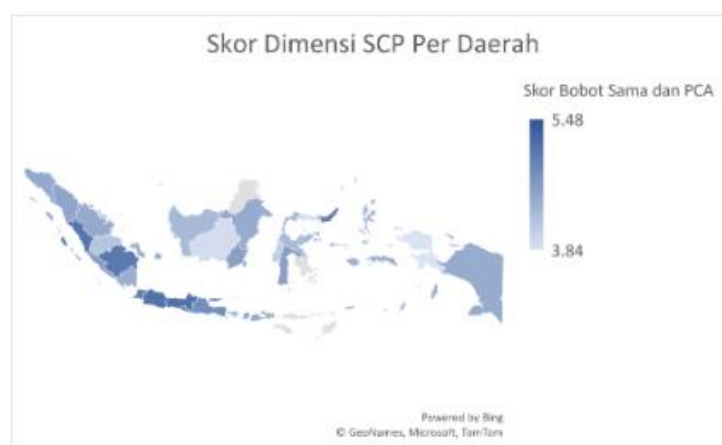
Berdasarkan Grafik 3 diketahui bahwa terdapat 9 sektor yang berada di atas rata-rata indeks dan 6 sektor yang berada dibawah rata-rata indeks. Berdasarkan kategori yang ada, indeks persaingan usaha sektoral hanya memiliki 2 kategori yakni berada dalam kategori sedikit tinggi dan moderat. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat sektor yang memiliki persaingan yang sangat tinggi dan cukup tinggi, serta tidak terdapat juga sektor dengan persaingan yang sedikit rendah, cukup rendah dan sangat rendah. Sektor-sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha di atas rata-rata (menggunakan bobot sama dan PCA) di antaranya perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial, transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; real esate. Kemudian sektor-sektor yang berada konsisten di bawah nilai rata-rata adalah sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, limbah dan daur ulang, dan pengadaan listrik dan gas.



Grafik 3 Indeks Persaingan Usaha Sektoral

Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 5.22 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil merupakan sektor yang kedua yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 5.21. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah.

### **Analisis Indeks Persaingan Usaha berdasarkan Dimensi S-C-P** ***Indeks Persaingan Usaha Per Daerah***



Gambar 3 Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia Berdasarkan S-C-P

Gambar 3 dan Grafik 4 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha hanya berdasarkan dimensi S-C-P untuk seluruh Provinsi yang menjadi objek studi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi S-C-P ialah sekitar 4.03-4.85 (bobot sama dan PCA) atau terkategori berada dalam kondisi persaingan yang moderat menuju persaingan cukup tinggi. Dari skor tersebut menunjukkan dari sisi struktur pasar, perilaku dan kinerja industri, secara umum persaingan usaha saat ini belum mengarah berada pada kondisi persaingan yang tinggi. Dari hasil skor indeks persaingan usaha dimensi SCP dengan bobot sama, diketahui kategori persaingan usaha untuk setiap Provinsi sebagai berikut:

- Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)  
Tidak ada provinsi dengan persaingan usaha cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama.
- Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)  
Terdapat 12 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera



Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sula.wesi Selatan, dan Sumatera Barat

- Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)

Terdapat sekitar 22 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bali, Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Papua Barat

- Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)

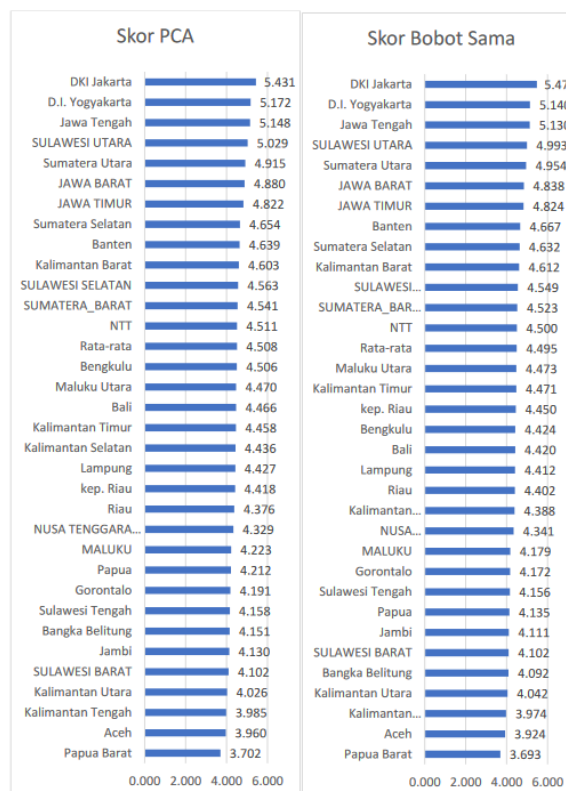
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah.

- Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)

Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.

- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)

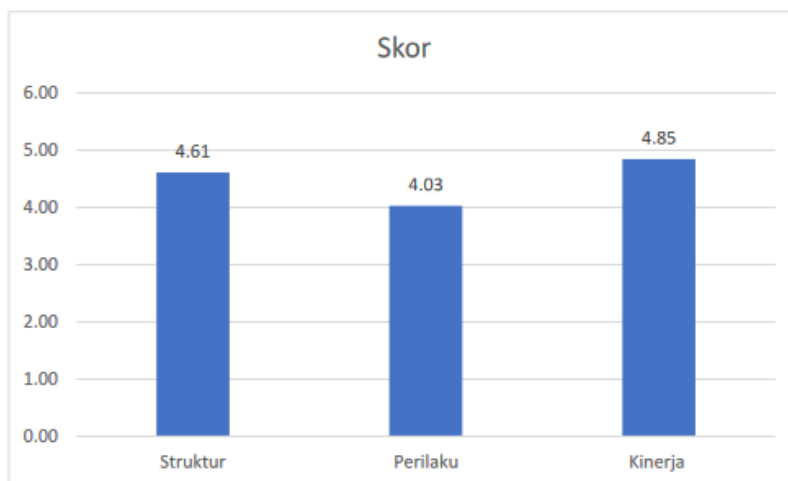
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.



Grafik 4 Skor Indeks Persaingan Usaha Per Provinsi Dimensi SCP Bobot PCA dan Bobot Sama

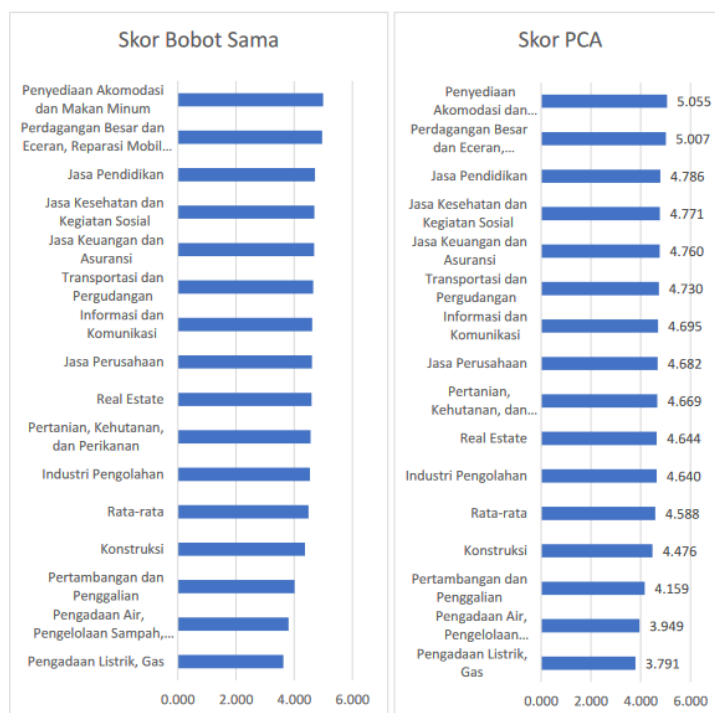
Dari sisi dimensi S-C-P, dimensi perilaku industri memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur pasar dan kinerja industri dengan masing-masing dimensi SCP memiliki skor sebesar 4.61, 4.03 dan 4.85. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada

persaingan usaha yang rendah.



Grafik 5 Rata-rata dimensi persaingan usaha berdasarkan S-C-P

Berdasarkan Grafik 6, sektor yang memiliki persaingan tertinggi di atas rata-rata adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman (berdasarkan bobot PCA (5.05) dan bobot yang sama (5.00)). Meski memiliki skor terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi untuk masing-masing sektor tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya pelaku usaha di sektor ini dan berkembangnya sektor lain seperti sektor pariwisata. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor dengan indeks tertinggi kedua tidak lepas dari perkembangan bisnis perdagangan yang meningkat dan jumlah pelaku usaha yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sama dengan tahun 2022 dan tahun 2021, Sektor yang pada umumnya dikuasi atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas dengan skor indeks sekitar 3.79 (bobot PCA) dan 3.63 (bobot sama), serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah dengan skor 3.95 (bobot PCA) dan 3.80 (bobot sama). Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena hambatan masuk dalam industri pertambangan dan penggalian relatif tinggi, utamanya dari sisi regulasi, permodalan dan teknologi.



Grafik 6 Indeks Persaingan Usaha Sektoral berdasarkan S-C-P

Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 5.22 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil merupakan sektor yang kedua yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 5.21. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan pengalihan juga memiliki skor yang relatif rendah.

### 3. Rekapitulasi Putusan KPPU yang dikuatkan dan/atau dibatalkan di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Mahkamah Agung TA 2023

No	Nomor Putusan KPPU	Perkara	Pengadilan	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	25/KPPU-I/2020	Tender Pengadaan Paket Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung TA 2017	Kasasi	22 Februari 2023	Putusan KPPU dikuatkan Menang



No	Nomor Putusan KPPU	Perkara	Pengadilan	Tanggal Putusan	Amar Putusan
2	02/KPPU-K/2020	Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi dengan Koperasi Pemukal Lestari	Niaga	13 November 2023	Putusan KPPU dibatalkan (Kalah)

#### 4. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2023 pada Program Pengawasan Persaingan Usaha Pendukung Prioritas Nasional

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>						
3952	Direktorat Ekonomi	<b>Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha</b>		<b>1.963.850.000</b>		
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	<b>PBB</b>	<b>1.963.850.000</b>	<b>5</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>
			PBB.001	963.850.000	2	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.002	700.000.000	1	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.003	300.000.000	2	Rekomendasi Kebijakan
5162	Direktorat Kebijakan Persaingan	<b>Analisis Kebijakan Pemerintah</b>		<b>1.217.862.000</b>	<b>9</b>	
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	<b>PBB</b>	<b>1.117.862.000</b>	<b>8</b>	<b>Rekomendasi kebijakan</b>
			PBB.001	462.992.000	2	Rekomendasi kebijakan
			PBB.002	419.830.000	5	Rekomendasi kebijakan
			PBB.003	235.040.000	1	Rekomendasi kebijakan
(UAB) Sistem Informasi Pemerintahan	<b>UAB</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Sistem Informasi</b>		

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
			UAB.001	100.000.000	1	Sistem Informasi
5194	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	<b>Advokasi Persaingan Usaha &amp; Kemitraan</b>		<b>1.396.830.000</b>		
		(PEB) Forum	<b>PEB</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Forum</b>
			PEB.001	25.000.000	1	Forum
		(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	<b>QDB</b>	<b>362.180.000</b>	<b>5</b>	<b>Lembaga</b>
			QDB.001	161.076.000	2	Lembaga
			QDB.002	201.104.000	3	Lembaga
		(QDH) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	<b>QDH</b>	<b>1.009.650.000</b>	<b>11</b>	<b>Badan Usaha</b>
			QDH.001	687.540.000	9	Badan Usaha
			QDH.002	322.110.000	2	Badan Usaha
3953	Direktorat Pengawasan Kemitraan	<b>Pengawasan Kemitraan</b>		<b>1.703.136.000</b>		
		(QCE) Penanganan Perkara	<b>QCE</b>	<b>1.703.136.000</b>	<b>10</b>	<b>Perkara</b>
			QCE.001	630.712.000	5	Berkas Perkara (Laporan Klarifikasi)
			QCE.002	290.200.000	2	Berkas Perkara (Laporan Penelitian Inisiatif)
			QCE.003	586.116.000	2	Perkara
			QCE.004	196.108.000	1	Perkara (Laporan Monitoring)

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
3958	Direktorat Merger	<b>Penilaian Merger dan Akuisisi</b>		<b>4.095.151.000</b>		
		(QCD) Perkara Hukum Badan Usaha	<b>QCD</b>	<b>453.483.000</b>	<b>6</b>	<b>Perkara</b>
			QCD.002	453.483.000	6	Berkas Perkara
		(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	<b>QIH</b>	<b>3.641.668.000</b>	<b>47</b>	<b>Badan Usaha</b>
			QIH.001	658.239.000	10	Badan Usaha
		QIH.002	2.983.429.000	37	Badan Usaha	
3956	Direktorat Investigasi	<b>Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>		<b>2.889.018.000</b>		
			<b>QCE</b>	<b>2.889.018.000</b>	<b>41</b>	
		(QCE) Penanganan perkara	QCE.001	1.512.168.000	30	Berkas Perkara
			QCE.002	336.000.000	3	Berkas Perkara
			QCE.003	910.850.000	6	Berkas Perkara
		QCE.004	130.000.000	2	Perkara	
3957	Direktorat Penindakan	<b>Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat</b>		<b>1.751.430.000</b>		
			<b>QCE</b>	<b>1.751.430.000</b>	<b>18</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	QCE.001	426.973.000	6	Berkas Perkara (Pemberkasan)
			QCE.002	922.800.000	9	Perkara (Penuntuan)
		QCE.003	401.657.000	3	Perkara (Litigasi)	
5275	Kepaniteran	<b>Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha</b>		<b>10.434.937.000</b>		
			<b>QCE</b>	<b>10.434.937.000</b>	<b>35</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	QCE.001	3.325.245.000	16	Perkara
		QCE.002	6.021.000.000	11	Perkara	



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/RO)	Satuan		
					Target			
			QCE.003	1.088.692.000	8	Perkara		
3955	Kantor Wilayah	<b>Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU</b>		<b>2.872.576.000</b>				
			<b>PBB</b>	<b>845.381.000</b>	<b>8</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>		
			PBB.001	108.276.000	1	Rekomendasi Kebijakan		
			PBB.002	152.419.000	2	Rekomendasi Kebijakan		
			PBB.003	82.619.000	1	Rekomendasi Kebijakan		
			PBB.004	77.784.000	1	Rekomendasi Kebijakan		
			PBB.005	135.000.000	1	Rekomendasi Kebijakan		
			PBB.006	209.283.000	1	Rekomendasi Kebijakan		
			PBB.007	80.000.000	1	Rekomendasi Kebijakan		
				<b>QCE</b>	<b>719.184.000</b>	<b>7</b>	<b>Pekara</b>	
				QCE.001	103.606.000	1	Pekara	
				QCE.002	102.418.000	1	Pekara	
				QCE.003	74.186.000	1	Pekara	
				QCE.004	77.784.000	1	Pekara	
				QCE.005	160.000.000	1	Pekara	
				QCE.006	131.190.000	1	Pekara	
				QCE.007	70.000.000	1	Pekara	
					<b>UBA</b>	<b>1.308.011.000</b>	<b>27</b>	<b>Prov/Kab/Kota</b>
				(UBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	UBA.001	176.593.000	4	Prov/Kab/Kota
					UBA.002	133.639.000	3	Prov/Kab/Kota
			UBA.003	152.855.000	4	Prov/Kab/Kota		
			UBA.004	232.907.000	4	Prov/Kab/Kota		

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/RO)	Satuan
					Target	
			UBA.005	248.915.000	4	Prov/Kab/Kota
			UBA.006	203.442.000	4	Prov/Kab/Kota
			UBA.007	159.660.000	4	Prov/Kab/Kota
<b>TOTAL</b>				<b>28.324.790.000</b>		

### 5. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2023 pada Program Dukungan Manajemen

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO)/ RO)	Satuan
					Target	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
<b>Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional</b>						
5971	Biro SDM dan Umum	<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum</b>		<b>81.435.922.000</b>		
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>75.005.475.000</b>	<b>5</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.956	614.742.000	1	Layanan
			EBA.959	938.059.000	1	Layanan
			EBA.960	1.219.012.000	1	Layanan
			EBA.962	360.819.000	1	Layanan
			EBA.994.001	45.444.622.000	1	Layanan
			EBA.994.002	26.428.221.000		
			(EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<b>EBB</b>	<b>797.200.000</b>	<b>55</b>
		EBB.951		795.200.000	54	Unit
EBB.971	2.000.000	1		Unit		

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/RO	Pagu (Rp)	Output (KRO)/RO)	Satuan
					Target	
		(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	<b>EBC</b>	<b>5.371.642.000</b>	<b>417</b>	<b>Orang</b>
			EBC.954	5.371.642.000	417	Orang
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>261.605.000</b>	<b>21</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.974	261.605.000	21	Dokumen
5972	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>EBC</b>	<b>3.900.392.000</b>	<b>519</b>	<b>Orang</b>
		(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	EBC.996	3.900.392.000	519	Orang
5973	Unit Data dan Informasi	<b>Peningkatan Data dan Informasi</b>	<b>EBA</b>	<b>923.032.000</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.963	923.032.000	1	Layanan
5974	Biro Hukum	<b>Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi</b>	<b>EBA</b>	<b>2.355.374.000</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.002	1.215.823.000	1	Layanan
			EBA.957	1.073.321.000	2	Layanan
			EBA.969	66.230.000	1	Layanan
5975	Biro Humas dan Kerjasama	<b>Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga</b>		<b>2.773.995.000</b>	<b>19</b>	<b>Forum</b>
		(AEB) Forum	<b>AEB</b>	<b>924.708.000</b>	<b>7</b>	<b>Forum</b>
			AEB.001	526.880.000	5	Forum
			AEB.002	397.828.000	2	Forum



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO)/ RO)	Satuan
					Target	
		(AEC) Kerja Sama	<b>AEC</b>	<b>603.048.000</b>	<b>6</b>	<b>Kesepakatan</b>
			AEC.001	603.048.000	6	Kesepakatan
		(AED) Perjanjian	<b>AED</b>	<b>152.992.000</b>	<b>2</b>	<b>Perjanjian</b>
			AED.001	152.992.000	2	Perjanjian
		(BMA) Data dan Informasi Publik	<b>BMA</b>	<b>337.714.000</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>
			BMA.001	304.464.000	1	Layanan
			BMA.002	33.250.000	1	Layanan
		(BMB) Komunikasi Publik	<b>BMB</b>	<b>269.547.000</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			BMB.001	269.547.000	1	Layanan
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>485.986.000</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.958	485.986.000	1	Layanan
		5976	Satuan Pengawasan Internal	<b>Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU</b>		<b>506.041.000</b>
(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>			<b>506.041.000</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>
	EBD.001			433.811.000	5	Dokumen
	EBD.965			72.230.000	2	Dokumen
5977	Biro Perencanaan dan Keuangan	<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU</b>	<b>EBD</b>	<b>2.315.259.000</b>	<b>15</b>	<b>Dokumen</b>
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001	227.510.000	2	Dokumen

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO)/ RO)	Satuan
					Target	
			EBD.002	67.721.000	1	Layanan
			EBD.952	1.045.525.000	6	Dokumen
			EBD.953	70.575.000	4	Dokumen
			EBD.955	903.928.000	2	Dokumen
<b>TOTAL</b>				<b>94.210.015.000</b>		

Catatan:

Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output – RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis Rincian Output (RO) merupakan keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

## 6. Rekapitulasi Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2022 dan 2023

2022		2023	
Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
135.642.665.000,-	134.014.621.930,-	122.534.805.000,-	120.681.840.512,-

## 7. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBK KPPU TA 2022 dan 2023

	2022		2023	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan PNBK	110.000.000.000	110.469.344.422		
Denda Persaingan Usaha			75.000.000.000	70.057.219.661
Layanan Notifikasi Merger			9.000.000.000	8.149.517.239
Pemanfaatan PNBK	46.923.823.000	46.105.249.292	20.275.170.000	20.134.671.360

## 8. Pagu dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2023 (menurut Sasaran Strategis)

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat</b>				
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 - 7)	4.578.542.000	4.565.604.285	99.72%
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	23.746.248.000	23.558.350.482	99.21%
<b>Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal</b>				
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan)	22.337.172.000	22.263.249.349	99.67%



No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)			
	Belanja Pegawai	45.444.622.000	44.141.844.214	97.13%
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.428.221.000	26.152.792.182	98.96%
	<b>TOTAL</b>	<b>122.534.805.000</b>	<b>120.681.840.512</b>	<b>98.49%</b>

### 9. Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	2020		2021		2022		2023		2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1.	SS-1: Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha	1.1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha	4.5	4.5	4.7	4.81	4.7	4.87	4.9	4.91	5.0
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80	111	85	100	90%	100%	100%	100%	100
2.	SS-2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government	2.1. Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government	75	103	78	76	79	77	80	80.39	90

**1. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi dan Kedeputian Penegakan Hukum dan TA 2023**

Kode	Sasaran Program (SS)/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>EG.01</b>	<b>Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik</b>				
01.01	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999 (Skala 1-7)	Indeks	6.17	7.00	113%
01.02	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 (Skala 1-7)	Indeks	6.00	6.00	100%
<b>EG.02</b>	<b>Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>				
02.01	Persentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan	Persentase	25	47.92	192%
02.02	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	Persentase	100	100	100%
02.03	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	Persentase	100	100	100%
02.04	Persentase banding/kasasi di Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100%
02.05	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	Persentase	100	100	100%
02.06	Indeks Layanan Kepaniteraan (Skala 1-7)	Indeks	4.53	6.30	139%

## 2. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Sekretariat Jenderal TA 2023

Kode	Sasaran Program (SS)/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
WA.01	Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU				
01.01	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)	Indeks	69.96	70.32	100%
01.02	Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai baik	Persentase	91.35	90.24	99%
01.03	Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis <i>e-government</i>	Ratio	4.00	4.00	100%
WA.02	Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi				
02.01	Persentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi	Persentase	85.09	86.37	101%
02.02	Indeks layanan umum operasional teknis internal (Skala 1-7)	Indeks	5.61	5.67	101%
02.03	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (Skala 1-7)	Indeks	5.50	5.78	105%
02.04	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	Indeks	290.00	336	116%
02.05	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (Skala 1-7)	Indeks	6.17	6.16	99%
02.06	Indeks Layanan Hukum (Skala 1-7)	Indeks	6.03	6.397	106%
02.07	Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1-5)	Nilai	4.00	3.084	77%
02.08	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU	Opini	WTP	WTP	100%



### 3. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputan Penegakan Hukum TA 2023

(Direktorat Investigasi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat				
3956.01	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha				
3956.01.01	Persentase laporan hasil klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	21	Persen	50	238%
3956.01.02	Persentase laporan hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	25	Persen	40	160%
3956.01.03	Persentase laporan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan	31	Persen	70.59	222%

(Direktorat Penindakan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat				
3957.01	Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat				
3957.01.01	Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100%
3957.01.02	Persentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan/sidang majelis komisi	100	Persen	100	100%
3957.01.03	Persentase dikuatkannya putusan KPPU di lembaga peradilan/ mahkamah agung sampai dengan tahun berjalan	63	Persen	66.67	106%

(Direktorat Merger dan Akuisisi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% realisasi
3958	Penilaian Merger dan Akuisisi				
3958.01	Terwujudnya penilaian dan penanganan perkara merger dan akuisisi yang efektif				
3958.01.01	Persentase notifikasi merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian	70	Persen	83.47	119%
3958.01.02	Persentase penilaian merger dan akuisisi yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3958.01.03	Persentase perkara merger dan akuisisi yang diselesaikan	100	Persen	100	100%

(Direktorat Pengawasan Kemitraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
3953	Pengawasan Kemitraan				
3953.01	Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan				
3953.01.01	Persentase penilaian perjanjian kemitraan yang sehat yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3953.01.02	Persentase penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3953.01.03	Persentase monitoring pelaksanaan surat peringatan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100	Persen	100	100%

(Kepaniteraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha				
5275.01	Terbuktinya dugaan pelanggaran persaingan usaha				
5275.01.01	Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana	100	Persen	100	100%
5275.01.02	Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
5275.01.03	Jumlah hasil Reviu Putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi	1	Reviu	1	100%



#### 4. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputan Kajian dan Advokasi TA 2022

(Direktorat Ekonomi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha				
3952.01	Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha				
3952.01.01	Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024	67	Persen	66.67	99%
3952.01.02	Persentase kajian ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha	50	Persen	67	133%
3952.01.03	Indeks Persaingan usaha	1	Survei	1	100%
3952.01.04	Jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan	2	Laporan	2	100%

(Direktorat Kebijakan Persaingan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5162	Analisis Kebijakan Persaingan				
5162.01	Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat				

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5162.01.01	Persentase pemerintah pusat K/L dan Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti sebagai referensi dalam proses	11.7	Persen	11.7	100%
5162.01.02	Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan	70	Persen	100	143%
5162.01.03	Persentase harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100%
5162.01.04	Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100%

(Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan				
5194.01	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat				
5194.01.01	Persentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat	100	Persen	100	100%
5194.01.02	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha (competition compliance)	600	Pelaku Usaha	605	101%

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5194.01.03	Jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	10	K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi	10	100%
5194.01.04	Jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Pelaku UMKM terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat	15	Kegiatan	15	100%
5194.01.05	Persentase Modul Advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi	100	Persen	100	100%



## 5. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Sekretariat Jenderal TA 2023

(Biro SDM dan Umum)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum				
5971.01	Terpenuhinya kualitas pengelolaan manajemen sumber daya manusia				
5971.01.01	Indeks Kepuasan pengguna layanan SDM (skala 1-7)	5.53	Layanan	5.89	107%
5971.01.02	Jumlah kebijakan perencanaan SDM	1	Peraturan	1	100%
5971.01.03	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar <i>hard competency</i> dan <i>soft competency</i>	99.02	Persen	91.62	101%
5971.01.04	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	89.55	Persen	90	101%
5971.01.05	Persentase Penilaian Kinerja pegawai dengan nilai minimal BAIK	100	Persen	100	100%
5971.01.06	Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan SDM (skala 1-7)	5.97	Persen	5.98	100%
5971.02	Meningkatnya layanan manajemen Barang Milik Negara				
5971.02.01	Persentase utilisasi aset K/L	84.15	Persen	88.72	105%
5971.02.02	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN (skala 1-7)	5.30	Indeks	5.6	106%
5971.03	Terwujudnya layanan umum teknis internal				
5971.03.01	Indeks layanan umum (skala 1-7)	5.61	Indeks	5.67	101%
5971.04	Terwujudnya layanan ketatausahaan dan keprotokolan				

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5971.04.01	Indeks layanan ketatausahaan dan keprotokoleran (skala 1-7)	5.5	Indeks	5.78	105%
5971.05	Terwujudnya layanan perkantoran Pusat dan Daerah				
5971.05.01	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah (skala 1-7)	5.61	Indeks	5.67	101%

(Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
5972.01	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi				
5972.01.01	Persentase lulusan diklat berbasis kompetensi dengan nilai minimal baik	91.35	Persen	90.24	99%
5972.01.02	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran (skala 1-7)	6.18	Indeks	6.20	100%
5972.01.03	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	82.00	Persen	82	100%

(Unit Data dan Informasi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5973	Peningkatan Data dan Informasi				
5973.01	Terwujudnya layanan sistem data dan informasi yang efektif				
5973.01.01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (skala 1-5)	4.54	Indeks	4.57	101%
5973.01.02	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	290	Indeks	336	116%

(Biro Hukum)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi				
5974.01	Terwujudnya layanan hukum				
5974.01.01	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan	80	Persen	88.24	110%
5974.01.02	Jumlah verifikasi atas produk hukum	524	Verifikasi	609	116%
5974.02	Terwujudnya layanan pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU yang efektif				
5974.02.01	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran denda persaingan usaha	32.73	Persen	22.67	69%
5974.01.02	Persentase target pelaksanaan eksekusi kepada terlapor di tahun berjalan	21.60	Persen	13.64	63%
5974.01.03	Jumlah upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait	86.00	Pemantauan	103	120%
5974.01.04	Persentase layanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara	100.00	Persen	100	100%
5974.03	Terwujudnya layanan bantuan hukum				
5974.03.01	Persentase keberhasilan pendampingan hukum	100	Persen	100	100%



(Biro Humas dan Kerjasama)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga				
5975.01	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif				
5975.01.01	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional (skala 1-7)	6.19	Indeks	6.15	99%
5975.01.02	Persentase peningkatan kontribusi lembaga di tingkat internasional	20	Persen	30	150%
5975.01.03	Persentase peningkatan komunikasi dan diseminasi praktek terbaik internasional bagi lembaga	32	Persen	52	163%
5975.02	Terpenuhinya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan informasi				
5975.02.01	Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	<17%	Persen	3.16	100%
5975.02.02	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)	6.23	Indeks	6.25	100%
5975.02.03	Persentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik	100	Persen	91.5	92%
5975.03	Terpenuhinya Pengelolaan layanan manajemen organisasi				
5975.03.01	Survey kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik (skala 1-7)	6.08	Indeks	6.07	100%

(Satuan Pengawasan Internal)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU				
5976.01	Terwujudnya Layanan Audit Internal				
5976.01.01	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	85	Persen	78	92%
5976.01.02	Nilai hasil telaah sejawat	74.25	Laporan Penilaian	76.75	103%
5976.01.03	Nilai Internal Audit Capability Model	3	Laporan Penilaian	3	100%

(Biro Perencanaan dan Keuangan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2023	
				Realisasi	% Realisasi
5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU				
5977.01	Terwujudnya layanan perencanaan				
5977.01.01	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan pada tahun berjalan	7	Dokumen	7	140%
5977.02	Terwujudnya layanan pemantauan dan evaluasi				
5977.02.01	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	Laporan	B	100%
5977.02.02	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	95.16	Nilai Smart	95.61	100%
5977.03	Terwujudnya layanan manajemen keuangan				
5977.03.01	Jumlah laporan keuangan (Tahunan dan Semester)	3	Laporan	3	100%
5977.03.02	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	Opini	WTP	100%

(Kantor Wilayah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU				
3955.01	Terwujudnya pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU				
3955.01.01	Persentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	46.15	Persen	66.67	144%
3955.01.02	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1	64.71	Persen	93.33	144%
3955.01.03	Persentase harmonisasi peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	75	Persen	83.33	111%
3955.01.04	Persentase advokasi persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.05	Persentase koordinasi dan implementasi MoU yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.06	Persentase pelaksanaan forum jurnalis yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.07	Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang diselesaikan	100	Persen	100	100%
3955.01.08	Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan	100	Persen	100	100%



## **6. Penjelasan kebutuhan, kondisi kompetensi dan jumlah pegawai KPPU menurut Road Map SDM 2020 – 2024**

Kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagian besar pegawai KPPU adalah investigator. Investigator harus memiliki ilmu-ilmu intelegensi dan memiliki kemampuan ekonomi, hukum, dan pelatihan ke luar negeri untuk memperoleh keahlian khusus. Diharapkan Investigator memiliki pendidikan S3, karena berhadapan dengan pelaku bisnis sehingga harus “setara” dari sisi kompetensi. Kewenangan dalam penyelidikan merupakan kewenangan investigator, berbeda halnya jika penyidik memiliki kewenangan tambahan misalnya menggeledah. Sampai dengan saat ini KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dalam konteks ini, diperlukan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan dengan fokus bidang investigasi, serta bidang merger dan akuisisi (Restrukturisasi). Tuntutan KPPU yang berhadapan dengan korporasi besar diharapkan tidak hanya berbicara mengenai hukum saja, tapi harus dapat melihat dari sisi ekonomi, misal: laporan keuangannya.

Selain itu dibutuhkan kapabilitas sebagai peneliti ekonomi. Maraknya kasus digital ekonomi menjadi tantangan untuk KPPU kedepannya. Kebutuhan SDM KPPU kedepan, selain SDM berlatar belakang hukum, juga perlu SDM berlatar belakang ekonomi dan manajemen, yang dapat melihat struktur pasar, ekonomi dan industri. Selain itu digitalisasi juga menuntut KPPU untuk memiliki ahli merger, ahli IT, ahli aset, dan ahli survei.

Struktur SDM KPPU saat ini adalah lebih banyak yang bersifat supporting/administrative dibandingkan dengan SDM yang menempati posisi core. Komposisinya adalah 60% SDM supporting, 40% SDM core. Kondisi struktur SDM seperti ini memang jauh dari ideal. Secara bertahap status maupun proporsi SDM core harus lebih tinggi dari SDM supporting.

Struktur SDM, perbandingan antara jumlah SDM supporting dengan core (investigator dan analis) untuk mencapai porsi yang ideal, yaitu 70% core dan 30% supporting.

Penyesuaian dilakukan secara gradual setiap tahun sampai tahun 2024:

Tahun 2020-2021: 50% core dan 50% supporting

Tahun 2022: 55% core dan 45% supporting

Tahun 2023: 60% core dan 40% supporting

Tahun 2024: 70% core dan 30% supporting

Mengingat perbandingan SDM saat ini lebih banyak yang supporting, maka penambahan SDM kedepan diutamakan untuk SDM core sampai tahun 2024:

Tahun 2020-2021: 69 investigator dan analis

Tahun 2022: 46 investigator dan analis

Tahun 2023: 56 investigator dan analis

Tahun 2024: 170 investigator dan analis

Target Jumlah (Ideal) Persebaran Pegawai core Berdasarkan Road Map SDM 2020-2024 dengan penempatan di setiap unit sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Jumlah Pegawai	Target Jumlah (Ideal) Persebaran Pegawai Core Berdasarkan Road Map SDM 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	16	3	0	0	0	
2.	Biro Hukum	11	4	0	0	0	
3.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	14	2	0	0	0	
4.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	105	2	0	0	0	
	· Unit Data dan Informasi	6	1	0	1	0	
	· Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	3	2	0	1	0	
5	Satuan Pengawasan Internal	9	1	0	2	2	
6	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	14					
7	Kanwil I Medan	23	4	0	2	5	
8	Kanwil II Lampung	19	3	0	2	5	
9	Kanwil III Bandung	14	2	0	2	5	
10	Kanwil IV Surabaya	16	2	0	2	5	
11	Kanwil V Balikpapan	15	3	0	2	5	
12	Kanwil VI Makassar	15	5	0	2	5	
13	Direktorat Ekonomi	13	2	9	5	14	
14.	Direktorat Kebijakan dan Persaingan	10	2	2	2	14	
15.	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	10	2	2	2	14	
16.	Direktorat Investigasi	20	9	13	11	27	
17.	Direktorat Merger dan Akusisi	15	6	5	4	23	
18.	Direktorat Pengawasan Kemitraan	16	4	10	9	18	
19.	Direktorat Penindakan	17	6	2	4	15	
20.	Kepaniteraan	12	4	0	3	13	
		<b>393</b>					
<b>Jumlah Total Persebaran Pegawai Core</b>			<b>69</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>170</b>	

KOMPONEN BIAYA	SATUAN	2020-2021	2022	2023	2024
SDM PUSAT TAMBAHAN (CORE)	Orang	32	18	24	80
SDM KANWIL BARU	Orang	9	9	9	9
SDM TAMBAHAN KANWIL EXISTING (CORE)	Orang	28	19	23	81
TOTAL TAMBAHAN SDM CORE	Orang	69	46	56	170
SDM TAMBAHAN KUMULATIF	Orang	69	115	171	341
GAJI RATA-RATA (GOL 5-13) PER BULAN	Rp	10,884,000	10,884,000	10,884,000	10,884,000
TOTAL GAJI TAMBAHAN CORE PER BULAN	Rp	750,996,000	1,251,660,000	1,861,164,000	3,711,444,000
TOTAL GAJI TAMBAHAN CORE PER TAHUN	Rp	9,011,952,000	15,019,920,000	22,333,968,000	44,537,328,000
JUMLAH KANWIL TAMBAHAN		1	1	1	1
FASILITAS KANWIL BARU	m2	477	477	477	477
PENAMBAHAN FASILITAS PUSAT	m2	160	90	120	400
PENAMBAHAN FASILITAS KANWIL EXISTING	m2	140	95	115	405
TOTAL PENAMBAHAN FASILITAS	m2	777	662	712	1282
BIAYA RATA-RATA PER m2 PER BULAN	Rp	200,000	200,000	200,000	200,000
TOTAL BIAYA FASILITAS TAMBAHAN PER TAHUN	Rp	1,864,800,000	1,588,800,000	1,708,800,000	3,076,800,000
BIAYA PERLENGKAPAN TAMBAHAN EXISTING (MEJA, KURSI, LAPTOP)	Rp	900,000,000	555,000,000	705,000,000	2,415,000,000
BIAYA PERLENGKAPAN KANWIL BARU	Rp	2,060,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000
BIAYA PENGEMBANGAN & MAINTENANCE SISTEM OFFICE AUTOMATION	Rp	300,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
TOTAL BIAYA TAMBAHAN	Rp	14,137,652,000	19,324,620,000	26,908,668,000	52,190,028,000

### ROAD MAP SDM KPPU 2020 - 2024





**7. Persentase Penyebaran SDM berdasarkan data Eksisting Pegawai KPPU(per 31 Desember 2023)**

	Unit Eselon I	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Per Eselon I	% Jumlah Pegawai Eselon 2 di Eselon 1 (Supporting dan Core)	% Jumlah Pegawai per Eselon I (Supporting & Core)	Jumlah Pegawai Supporting dan Core	% Jumlah Pegawai Eselon 1 Supporting dan Core
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Sekretris Jenderal	1	178	1%	46%	285	74%
2	Staf Ahli KPPU	2		1%			
3	Kelompok Kerja	8		4%			
4	Dewan Pakar	1		1%			
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	11		6%			
6	Biro Hukum	10		6%			
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	11		6%			
8	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	84		47%			
9	Unit Data dan Informasi	4		2%			
10	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	3		2%			
11	Satuan Pengawas Internal	7		4%			
12	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	36		20%			
13	Kanwil I Medan	17	107	16%	28%		
14	Kanwil II Lampung	15		14%			
15	Kanwil III Bandung	11		10%			

	Unit Eselon I	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Per Eselon I	% Jumlah Pegawai Eselon 2 di Eselon 1 (Supporting dan Core)	% Jumlah Pegawai per Eselon I (Supporting & Core)	Jumlah Pegawai Supporting dan Core	% Jumlah Pegawai Eselon 1 Supporting dan Core
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
16	Kanwil IV Surabaya	15		14%			
17	Kanwil V Balikpapan	10		9%			
18	Kanwil VI Makassar	13		12%			
19	Kanwil VII Yogyakarta	10		9%			
20	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	16		15%			
21	Deputi Bidang Kajian dan Advokasi	1	26	4%	7%		
22	Direktorat Ekonomi	8		31%			
23	Direktorat Kebijakan Persaingan	7		27%			
24	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	10		38%			
25	Deputi Bidang Penegakan Hukum	1	72	1%	19%	98	26%
26	Direktorat Investigasi	16		22%			
27	Direktorat Merger dan Akusisi	16		22%			
28	Direktorat Pengawasan Kemitraan	13		18%			
29	Direktorat Penindakan	13		18%			
30	Kepaniteraan	13		18%			
<b>TOTAL</b>		<b>383</b>	<b>383</b>			<b>383</b>	

## 8. Persentase Perbandingan Alokasi Anggaran di Core dan Supporting TA 2023

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di Supporting dan Core	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di Supporting dan Core	% Anggaran Supporting dan Core (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan	Anggaran per Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji &
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	2.315.259.000			2.315.259.000	5%		
2	Biro Hukum	2.355.374.000			2.355.374.000	5%		
3	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	2.773.995.000			2.773.995.000	5%		
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	81.435.922.000			9.563.079.000	19%		



No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	% Anggaran <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	Anggaran per Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji & Operasional)
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
5	Unit Data dan Informasi	923.032.000			923.032.000	2%		
6	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	3.900.392.000			3.900.392.000	8%		
7	Satuan Pengawasan Internal	506.041.000			506.041.000	1%		
8	Kanwil I Medan	388.475.000			388.475.000	1%		
9	Kanwil II Lampung	388.476.000			388.476.000	1%		
10	Kanwil III Bandung	309.660.000			309.660.000	1%		
11	Kanwil IV Surabaya	388.475.000			388.475.000	1%		

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	% Anggaran <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	Anggaran per Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji & Operasional)
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
12	Kanwil V Balikpapan	543.915.000			543.915.000	1%		
13	Kanwil VI Makassar	543.915.000			543.915.000	1%		
14	Kanwil VII Yogyakarta	309.660.000			309.660.000	1%		
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>97.082.591.000</b>	<b>79%</b>			<b>25.209.748.000</b>	<b>50%</b>
15	Direktorat Ekonomi	1.963.850.000			1.963.850.000	4%		
16	Direktorat Kebijakan Persaingan	1.217.862.000			1.217.862.000	2%		
17	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	1.396.830.000			1.396.830.000	3%		
18	Direktorat Investigasi	2.889.018.000			2.889.018.000	6%		
19	Direktorat Merger dan Akusisi	4.095.151.000			4.095.151.000	8%		

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di Supporting dan Core	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di Supporting dan Core	% Anggaran Supporting dan Core (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	Anggaran per Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji & Operasional)
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
20	Direktorat Pengawasan Kemitraan	1.703.136.000			1.703.136.000	3%		
21	Direktorat Penindakan	1.751.430.000			1.751.430.000	3%		
22	Kepaniteraan	10.434.937.000			10.434.937.000	21%		
<b>Program Persaingan Usaha</b>			<b>25.452.214.000</b>	<b>21%</b>			<b>25.452.214.000</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122.534.805.000</b>	<b>122.534.805.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.661.962.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.661.962.000</b>	<b>100%</b>

Operasional Perkantoran	26.428.221.000
Gaji dan Tunjangan	45.444.622.000
Total Anggaran tanpa Operasional dan Gaji	50.661.962.000



**9. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2023 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk pencapaian Prioritas Nasional (PN-1)\***

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>								
3952	Direktorat Ekonomi	<b>Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha</b>		<b>1.963.850.000</b>	<b>1.954.274.019</b>			
			<b>PBB</b>	<b>1.963.850.000</b>	<b>1.954.274.019</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	PBB.001	963.850.000	960.666.700	2	3	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.002	700.000.000	697.141.199	1	1	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.003	300.000.000	296.466.120	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5162	Direktorat Kebijakan Persaingan	<b>Analisis Kebijakan Pemerintah</b>		<b>1.217.862.000</b>	<b>1.214.927.441</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	<b>PBB</b>	<b>1.117.862.000</b>	<b>1.115.055.591</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>Rekomendasi kebijakan</b>
			PBB.001	462.992.000	462.373.552	2	3	Rekomendasi kebijakan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
			PBB.002	419.830.000	417.667.882	5	10	Rekomendasi kebijakan
			PBB.003	235.040.000	235.014.157	1	1	Rekomendasi kebijakan
		(UAB) Sistem Informasi Pemerintahan	<b>UAB</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.871.850</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Sistem Informasi</b>
			UAB.001	100.000.000	99.871.850	1	1	Sistem Informasi
5194	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	<b>Advokasi Persaingan Usaha &amp; Kemitraan</b>		<b>1.396.830.000</b>	<b>1.396.402.825</b>			
		(PEB) Forum	<b>PEB</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.998.250</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Forum</b>
			PEB.001	25.000.000	24.998.250	1	1	Forum
		(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	<b>QDB</b>	<b>362.180.000</b>	<b>362.115.338</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Lembaga</b>
			QDB.001	161.076.000	161.040.132	2	2	Lembaga
			QDB.002	201.104.000	201.075.206	3	3	Lembaga

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
		(QDH) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	<b>QDH</b>	<b>1.009.650.000</b>	<b>1.009.289.237</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Badan Usaha</b>
			QDH.001	687.540.000	687.250.578	9	9	Badan Usaha
			QDH.002	322.110.000	322.038.659	2	2	Badan Usaha
3953	Direktorat Pengawasan Kemitraan	<b>Pengawasan Kemitraan</b>		<b>1.703.136.000</b>	<b>1.688.293.062</b>			
		(QCE) Penanganan Perkara	<b>QCE</b>	<b>1.703.136.000</b>	<b>1.688.293.062</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>Perkara</b>
			QCE.001	630.712.000	628.220.102	5	8	Berkas Perkara (Laporan Klarifikasi)
			QCE.002	290.200.000	283.032.282	2	2	Berkas Perkara (Laporan Penelitian Inisiatif)
			QCE.003	586.116.000	581.324.225	2	12	Perkara
			QCE.004	196.108.000	195.716.453	1	9	Perkara (Laporan Monitoring)



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
3958	Direktorat Merger	<b>Penilaian Merger dan Akuisisi</b>		<b>4.095.151.000</b>	<b>4.056.527.864</b>			
		(QCD) Perkara Hukum Badan Usaha	<b>QCD</b>	<b>453.483.000</b>	<b>453.383.549</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Perkara</b>
			QCD.002	453.483.000	453.383.549	6	6	Berkas Perkara
		(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	<b>QIH</b>	<b>3.641.668.000</b>	<b>3.603.144.315</b>	<b>47</b>	<b>394</b>	<b>Badan Usaha</b>
			QIH.001	658.239.000	655.430.138	10	121	Badan Usaha
			QIH.002	2.983.429.000	2.947.714.177	37	273	Badan Usaha
3956	Direktorat Investigasi	<b>Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>		<b>2.889.018.000</b>	<b>2.881.832.790</b>			
		(QCE) Penanganan perkara	<b>QCE</b>	<b>2.889.018.000</b>	<b>2.881.832.790</b>	<b>41</b>	<b>125</b>	
			QCE.001	1.512.168.000	1.506.791.952	30	96	Berkas Perkara
			QCE.002	336.000.000	335.728.946	3	10	Berkas Perkara
			QCE.003	910.850.000	909.679.555	6	16	Berkas Perkara
			QCE.004	130.000.000	129.632.337	2	3	Perkara

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
3957	Direktorat Penindakan	<b>Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat</b>		<b>1.751.430.000</b>	<b>1.743.540.052</b>			
			<b>QCE</b>	<b>1.751.430.000</b>	<b>1.743.540.052</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	QCE.001	426.973.000	424.389.941	6	12	Berkas Perkara (Pemberkasan)
			QCE.002	922.800.000	917.850.240	9	10	Perkara (Penuntuan)
			QCE.003	401.657.000	401.299.871	3	3	Perkara (Litigasi)
5275	Kepaniteran	<b>Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha</b>		<b>10.434.937.000</b>	<b>10.325.542.441</b>			
			<b>QCE</b>	<b>10.434.937.000</b>	<b>10.325.542.441</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	QCE.001	3.325.245.000	3.305.838.761	16	16	Perkara
			QCE.002	6.021.000.000	5.937.776.582	11	8	Perkara
			QCE.003	1.088.692.000	1.081.927.098	8	9	Perkara

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
3955	Kantor Wilayah	<b>Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU</b>		<b>2.872.576.000</b>	<b>2.862.614.273</b>			
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	<b>PBB</b>	<b>845.381.000</b>	<b>844.199.673</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>
			PBB.001	108.276.000	108.225.841	1	3	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.002	152.419.000	152.334.222	2	2	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.003	82.619.000	82.613.050	1	2	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.004	77.784.000	77.715.158	1	1	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.005	135.000.000	134.219.020	1	1	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.006	209.283.000	209.155.822	1	2	Rekomendasi Kebijakan
			PBB.007	80.000.000	79.936.560	1	1	Rekomendasi Kebijakan
		(QCE) Penanganan Perkara	<b>QCE</b>	<b>719.184.000</b>	<b>716.560.588</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>Pekara</b>
			QCE.001	103.606.000	102.540.557	1	5	Pekara
			QCE.002	102.418.000	102.355.046	1	4	Pekara
			QCE.003	74.186.000	74.122.897	1	1	Pekara



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO/RO)		Satuan
						Target	Realisasi	
			QCE.004	77.784.000	77.696.464	1	1	Pekara
			QCE.005	160.000.000	158.761.637	1	2	Pekara
			QCE.006	131.190.000	131.103.987	1	1	Pekara
			QCE.007	70.000.000	69.980.000	1	1	Pekara
		(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	<b>UBA</b>	<b>1.308.011.000</b>	<b>1.301.854.012</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>Prov/Kab/Kota</b>
			UBA.001	176.593.000	176.486.435	4	7	Prov/Kab/Kota
			UBA.002	133.639.000	133.413.008	3	4	Prov/Kab/Kota
			UBA.003	152.855.000	152.816.219	4	14	Prov/Kab/Kota
			UBA.004	232.907.000	232.713.777	4	4	Prov/Kab/Kota
			UBA.005	248.915.000	244.041.361	4	4	Prov/Kab/Kota
			UBA.006	203.442.000	203.008.238	4	5	Prov/Kab/Kota
			UBA.007	159.660.000	159.374.974	4	4	Prov/Kab/Kota
<b>TOTAL</b>				<b>28.324.790.000</b>	<b>28.123.954.767</b>			

Keterangan: \*data berdasarkan aplikasi Sakti.Kemenkeu (Modul Pembayaran)

**10. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2023 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional\***

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO)/RO		Satuan
						Target	Realisasi	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional</b>								
		<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum</b>		<b>81.435.922.000</b>	<b>79.822.740.146</b>			
<b>5971</b>	<b>Biro SDM dan Umum</b>	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>75.005.475.000</b>	<b>73.403.055.935</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.956	614.742.000	611.203.087	1	1	Layanan
			EBA.959	938.059.000	937.463.325	1	1	Layanan
			EBA.960	1.219.012.000	1.212.903.673	1	1	Layanan
			EBA.962	360.819.000	346.849.454	1	1	Layanan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO)/RO		Satuan
						Target	Realisasi	
			EBA.994.001	45.444.622.000	44.141.844.214	1	1	Layanan
			EBA.994.002	26.428.221.000	26.152.792.182			
			<b>EBB</b>	<b>797.200.000</b>	<b>795.038.600</b>	<b>55</b>	<b>96</b>	<b>Unit</b>
		(EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	EBB.951	795.200.000	793.396.100	54	95	Unit
			EBB.971	2.000.000	1.642.500	1	1	Unit
			<b>EBC</b>	<b>5.371.642.000</b>	<b>5.363.253.261</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>Orang</b>
		(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	EBC.954	5.371.642.000	5.363.253.261	417	417	Orang
			<b>EBD</b>	<b>261.605.000</b>	<b>261.392.350</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>Dokumen</b>
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.974	261.605.000	261.392.350	21	21	Dokumen
<b>5972</b>	<b>Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>EBC</b>	<b>3.900.392.000</b>	<b>3.895.678.829</b>	<b>519</b>	<b>522</b>	<b>Orang</b>



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO)/RO		Satuan
						Target	Realisasi	
		(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	EBC.996	3.900.392.000	3.895.678.829	519	522	Orang
5973	Unit Data dan Informasi	<b>Peningkatan Data dan Informasi</b>	<b>EBA</b>	<b>923.032.000</b>	<b>920.086.347</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.963	923.032.000	920.086.347	1	1	Layanan
5974	Biro Hukum	<b>Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi</b>	<b>EBA</b>	<b>2.355.374.000</b>	<b>2.352.686.681</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.002	1.215.823.000	1.214.264.753	1	1	Layanan
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.957	1.073.321.000	1.072.252.021	2	2	Layanan
			EBA.969	66.230.000	66.169.907	1	1	Layanan
5975	Biro Humas dan Kerjasama	<b>Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga</b>		<b>2.773.995.000</b>	<b>2.750.687.660</b>			

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO)/RO		Satuan
						Target	Realisasi	
			<b>AEB</b>	<b>924.708.000</b>	<b>920.546.219</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Forum</b>
		(AEB) Forum	AEB.001	526.880.000	523.610.809	5	5	Forum
			AEB.002	397.828.000	396.935.410	2	2	Forum
			<b>AEC</b>	<b>603.048.000</b>	<b>601.108.111</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Kesepakatan</b>
		(AEC) Kerja Sama	AEC.001	603.048.000	601.108.111	6	6	Kesepakatan
			<b>AED</b>	<b>152.992.000</b>	<b>152.401.762</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Perjanjian</b>
		(AED) Perjanjian	AED.001	152.992.000	152.401.762	2	2	Perjanjian
			<b>BMA</b>	<b>337.714.000</b>	<b>324.036.358</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>
		(BMA) Data dan Informasi Publik	BMA.001	304.464.000	295.924.602	1	1	Layanan
			BMA.002	33.250.000	28.111.756	1	1	Layanan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO)/RO		Satuan
						Target	Realisasi	
		(BMB) Komunikasi Publik	<b>BMB</b>	<b>269.547.000</b>	<b>267.804.415</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			BMB.001	269.547.000	267.804.415	1	1	Layanan
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>485.986.000</b>	<b>484.790.795</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.958	485.986.000	484.790.795	1	1	Layanan
5976	Satuan Pengawasan Internal	<b>Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU</b>		<b>506.041.000</b>	<b>501.648.480</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>506.041.000</b>	<b>501.648.480</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.001	433.811.000	429.607.123	5	5	Dokumen
			EBD.965	72.230.000	72.041.357	2	2	Dokumen
5977	Biro Perencanaan dan Keuangan	<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU</b>	<b>EBD</b>	<b>2.315.259.000</b>	<b>2.314.357.602</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>Dokumen</b>



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output (KRO)/RO		Satuan
						Target	Realisasi	
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001	227.510.000	227.496.950	2	3	Dokumen
			EBD.002	67.721.000	67.671.500	1	1	Layanan
			EBD.952	1.045.525.000	1.045.351.568	6	7	Dokumen
			EBD.953	70.575.000	70.569.800	4	5	Dokumen
			EBD.955	903.928.000	903.267.784	2	3	Dokumen
<b>TOTAL</b>				<b>94.210.015.000</b>	<b>92.557.885.745</b>			

Keterangan: \*data berdasarkan aplikasi Sakti.Kemenkeu (Modul Pembayaran)

## SEKRETARIAT KPPU

### KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120, DKI Jakarta.

Faks : (021) 3507008

Telp : (021) 3507015, 3507016, 3507043

Email : pengaduan@kppu.go.id

#### KANTOR WILAYAH I (MEDAN)

Jl. Gatot Subroto No. 148 B, Sekip,  
Medan Petisah, Kota Medan,  
Sumatera Utara 201113.

Telp. : 061-4558133 / 88741230

Faks. : 061-4148603

Email : kpd\_medan@icc.go.id /  
kanwil1@kppu.go.id

#### KANTOR WILAYAH II (LAMPUNG)

Jl. Diponegoro, Kelurahan Sumur Batu,  
Kecamatan Teluk Betung Utara,  
Kota Bandar Lampung, Lampung 35212.

Telp. : 0721-6013235

Faks. : 0721-6016498

Email : kanwil2@kppu.go.id

#### KANTOR WILAYAH III (BANDUNG)

Jl. Aceh No. 52, Bandung,  
Jawa Barat 40113.

Telp. : 022-20506680

Faks. : 022-20506680

Email : kanwil3@kppu.go.id

#### KANTOR WILAYAH IV (SURABAYA)

Jl. Embong Sawo No. 36, Embong Kaliasin,  
Kec. Genteng, Surabaya,  
Jawa Timur 60271.

Telepon : (031) 35979077

Email: kpd\_surabaya@icc.go.id /  
kanwil4@kppu.go.id

#### KANTOR WILAYAH V (SAMARINDA)

Jalan Dahlia No. 6, Bugis Kec. Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Telp. : 0542-730373

Faks. : 0542-415939

Email : kpd\_balikpapan@icc.go.id /  
kanwil5@kppu.go.id

#### KANTOR WILAYAH VI (MAKASSAR)

Gedung Keuangan Negara II Lt. 6,  
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Makassar,  
Sulawesi Selatan.

Telp. : 0411-429927 / 429957

Faks. : 0411-429958

Email : kpd\_makassar@icc.go.id /  
kanwil6@kppu.go.id

#### KANTOR WILAYAH VII (YOGYAKARTA)

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1,  
Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55272.

Telp. : 0274-5017163

Faks. : 0274-5017163

Email : kanwil7@icc.go.id /  
kanwil7@kppu.go.id



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA